



PEMERINTAH
KOTA PASURUAN

2021-2026

PERUBAHAN **RENCANA STRATEGIS**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



[dpuprkota.pasuruan](https://www.instagram.com/dpuprkota.pasuruan)



pupr.pasuruankota.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, hingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan tahun 2021-2026 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini.

Walaupun demikian, sepenuhnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan Renstra pada khususnya, dan perbaikan keterukuran kinerja program-kegiatan pada umumnya.

Akhir kata, semoga penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan ini dapat bermanfaat dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2021-2026.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN

GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19670824 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24	
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .	111
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	113
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	123
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	152
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	194

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	196
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	196
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	200
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	212
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	256
BAB VIII PENUTUP	260

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2020	12
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Non PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2020	14
Tabel 2. 3 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	15
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.....	25
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan	35
Tabel 2. 4 Kertas Kerja untuk Identifikasi Tantangan dan Peluang (dengan Renstra K/L) pada Sub Bab 2.4	50
Tabel 2. 5 Kertas Kerja untuk Identifikasi Tantangan dan Peluang (dengan Renstra PD Provinsi) pada Sub Bab 2.4	61
Tabel 2. 6 Pemetaan Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaah RTRW	74
Tabel 2. 7 Pemetaan Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaah KLHS	107
Tabel 3. 1 Lampiran Kertas Kerja Penyajian Masalah.....	111
Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	115
Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	132

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	142
Tabel 3. 5 Telaahan Tata Ruang Terkait Permasalahan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	153
Tabel 3. 6 Telaah KLHS terkait Permasalahan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	191
Tabel 3. 7 Pemetaan Isu Strategis	194
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	197
Tabel 4. 2 Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .	199
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.....	201
Tabel 5. 2 Time Horizon Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	203
Tabel 5. 3 Keterkaitan Agenda Prioritas Kepala Daerah dengan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	207
Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213
Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan RPJMD	257

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam periode Renstra 2021-2026 terdapat beberapa tuntutan pembangunan terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdapat dalam arah kebijakan yang dirumuskan untuk mendukung tercapainya Visi Misi Walikota. Berikut beberapa arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, diantaranya:

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat
2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang bersih ke masyarakat
3. Peningkatan drainase yang berfungsi dengan baik, serta
4. Penataan ruang yang bersih dan hijau

Dalam upaya merealisasikan pembangunan daerah dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud berupa rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta rencana perangkat daerah berupa Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 1-5 tahun yang berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintah pilihan maupun non urusan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkat pemerintah maupun perangkat daerah.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah, maka proses penyusunan Renstra PD harus melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta harus dikoordinasikan dengan Bappelitbangda.

Penyusunan Perubahan Renstra 2021 - 2026 ini mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025. Pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra 2021 - 2026 ini diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada Renstra K/L serta Renstra PD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penjabaran lebih detail mengenai Renstra akan dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021; dan
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkat pemerintah maupun perangkat daerah serta sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan periode tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Pasuruan periode masa jabatan 2021-2026 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2021-2026;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan
3. Menjamin terciptanya sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama periode 2021-2026;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan;
5. Membantu mempercepat Proses Pengambilan Kebijakan dan Penentuan Prioritas dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan untuk mewujudkan Visi, dan Misi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Terdiri dari Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2020, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan, Telaahan Terhadap Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra PD Pemerintah Provinsi Terkait, Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

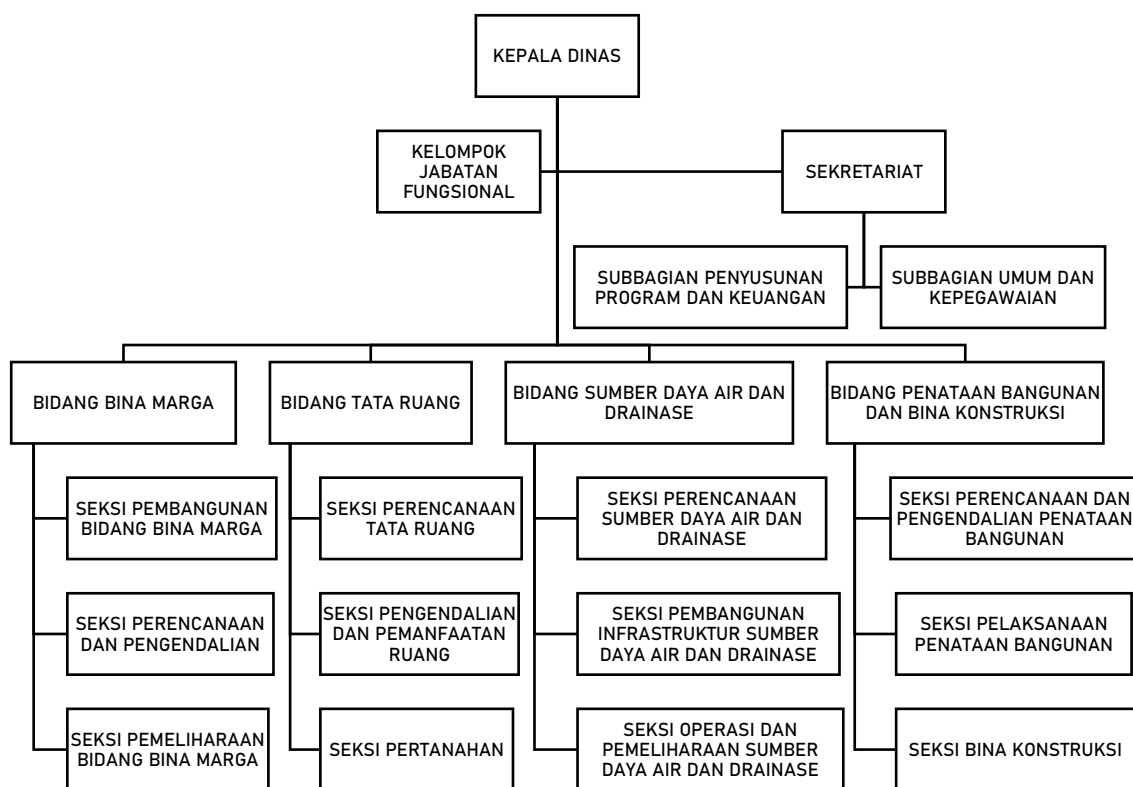
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 22 A Pasuruan dan dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

Gambar 2. 1

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertuang dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. pembinaan terhadap UPT

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang bina marga;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang bina marga;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang bina marga;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang bina marga; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang tata ruang;

- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata ruang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata ruang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata ruang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang sumber daya air;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya air;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya air;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penataan bangunan dan bina konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan terdiri atas sumber daya manusia, modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 1. Sumber daya yang paling utama berupa ketersediaan pegawai. Jumlah personil yang dimiliki menurut tingkat pendidikan serta pangkat dan golongan yang terperinci dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

Tabel 2. 1

Komposisi Pegawai PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2020

No	Komposisi Pegawai (PNS)	Laki-Laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan		
	- Sekolah Dasar	4	-
	- Sekolah Menengah Pertama	4	-
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	13	1
	- Diploma 1	-	-
	- Diploma 2	-	-
	- Diploma 3	1	3
	- Diploma 4	1	1
	- Sarjana	10	11
	- Pasca Sarjana	8	2
	Jumlah	41	18
2	Menurut Golongan		

No	Komposisi Pegawai (PNS)	Laki-Laki	Perempuan
	- Golongan I	4	-
	- Golongan II	18	3
	- Golongan III	14	14
	- Golongan IV	5	1
Jumlah		41	18

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan

Menurut tabel 2.1 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelaminnya, mayoritas pegawai PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan adalah laki – laki, dengan jumlah 41 orang atau setara dengan 69% dari total 59 orang pegawai PNS di DPUPR. Sedangkan jumlah PNS perempuan adalah 18 orang atau setara dengan 31%.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, mayoritas pegawai PNS DPUPR merupakan lulusan Sarjana sebanyak 21 orang atau setara dengan 36% dari total 59 orang pegawai PNS, disusul dengan lulusan SLTA sebesar 24%, lulusan Pasca Sarjana sebesar 17%, lulusan Diploma 3, SMP dan SD yang masing-masing sebesar 7%, dan terakhir lulusan Diploma 4 sebesar 3%.

Berdasarkan golongannya, pegawai PNS DPUPR didominasi oleh Golongan III sebanyak 28 orang atau setara dengan 47% dari total 59 orang pegawai PNS, disusul dengan Golongan II sebesar 36%, Golongan IV sebesar 10% dan terakhir Golongan I sebesar 7%.

Berdasarkan peta jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Pasuruan, masih terdapat banyak jabatan pelaksana yang kosong. Sehingga selama periode renstra 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan akan menambah personil pegawai PNS.

Tabel 2. 2

Komposisi Pegawai Non PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2020

No	Komposisi Pegawai (Non PNS)	Laki-Laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan		
	- Sekolah Dasar	-	-
	- Sekolah Menengah Pertama	3	-
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	8	-
	- Diploma 1	-	-
	- Diploma 2	-	-
	- Diploma 3	-	-
	- Diploma 4	-	-
	- Sarjana	4	1
	- Pasca Sarjana	-	-
	Jumlah	15	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan

Menurut tabel 2.2 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelaminnya, mayoritas pegawai Non PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan adalah laki – laki, dengan jumlah 15 orang atau setara dengan 88% dari total 16 orang pegawai Non PNS di DPUPR. Sedangkan jumlah Non PNS perempuan adalah 1 orang atau setara dengan 6,25%.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, mayoritas pegawai Non PNS DPUPR merupakan lulusan SLTA sebanyak 8 orang atau setara dengan 50% dari total 16 orang pegawai Non PNS, disusul dengan lulusan Sarjana sebesar 31,25%, dan terakhir lulusan SMP sebesar 18.75%.

2. Jumlah prasarana dan sarana kerja yang dimiliki berdasarkan catatan inventaris sebagaimana terperinci dalam tabel 2.3

Selain sumber daya manusia, jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki turut mendukung upaya tercapainya capaian kinerja perangkat daerah. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
1	GEDUNG		
	Kantor Utama DPUPR	2002	1
	UPT Uji Mutu	2002	1
	Gudang Belakang	2002	1
2	KENDARAAN		
	Roda Dua :		
	VARIO	2015	2
		2016	8
		2017	5
	MIO GT 12	2014	3
	Roda Tiga :		
	VIAR	2015	1
		2019	2
	Mobil :		
	L 300	2013	1
	STRADA TRITON	2016	1
	AVANZA	2009	1
		2016	1

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
	D-MAX	2014	1
	PICK UP	2013	1
		2014	1
		2015	1
		2019	2
	Perahu :		
	Perahu 15 PK	2013	1
	PERAHU BERMOTOR	2013	1
	Perahu	2016	1
	PERAHU SAMPAN	2016	1
3	PERALATAN		
	AC	2002	1
		2004	1
		2006	1
		2008	1
		2009	1
		2010	1
		2011	1
		2012	1
		2013	1
		2014	1
		2015	3
		2016	2
		2017	2

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
		2018	2
		2019	1
	ALAT ABSENSI FACE EYES	2016	1
	ALAT LAB. ASPAL & CAT KIMIA	2003	10
		2004	1
	ALAT LAB. LINGKUNGAN	2003	1
	ALAT LAS LISTRIK	2016	1
	ALAT PEMADAM PORTABLE	2004	1
		2016	1
	ALAT PENGHANCUR KERTAS	2017	1
	ALAT UKUR LAINNYA	2012	6
		2017	8
		2018	2
	ALAT UKUR UNIVERSAL LAIN - LAIN	2013	6
		2019	6
	BRAND KAS	2002	1
	CAMERA	2017	2
	CAMERA + ATTACHMENT	2019	1
	CCTV	2012	1
	COMPAS GEOLOGI	2002	1
	CONCRATE HAMMER TEST	2003	1
	CPU	2002	4
	CUTERPILAR	2014	1
	DISPENSER	2002	1

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
		2008	1
	EXAVATOR MINI	2016	1
	FILLING BESI	2002	1
		2004	2
		2006	1
		2007	1
		2008	1
		2010	7
		2015	1
	GENSET	2016	1
		2017	2
	GERGAJI MESIN	2020	2
	GPS	2014	1
		2015	1
		2016	5
	GPS RADAR	2018	1
	HANDYCAM	2010	1
	HARDDISK EKSTERNAL	2018	1
	KAMERA	2006	1
		2010	1
	KAMERA DIGITAL	2007	1
		2014	1
	KAMERA GPS	2014	1
	KAMERA LENSE	2016	1

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
	KAMERA SAKU	2018	1
	KEYBOARD	2002	2
	KIPAS ANGIN	2002	1
		2015	1
	KOMPOR GAS	2008	1
	KULKAS	2008	1
		2015	1
	KURSI KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	2019	4
	KURSI RAPAT RUANGAN RAPAT STAFF	2019	10
	LAPTOP	2002	1
		2003	1
		2005	1
		2010	1
		2012	1
		2013	1
		2014	2
		2015	1
		2016	5
		2017	2
		2019	2
	LEMARI BESI	2019	3
	LOUDSPEAKER	2002	1
	MEJA KERJA	2019	2

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
	MESIN ABSENSI	2013	1
		2019	6
	MESIN CACAH	2002	1
	MESIN FAXIMILE	2002	1
	MESIN GILAS	2002	6
	MESIN KETIK	2006	1
		2007	1
	MESIN LAS	2002	1
		2014	1
	MESIN PEMADATAN TANAH	2002	2
	MESIN POMPA AIR	2019	2
	MESIN POTONG RUMPUT	2018	2
		2019	2
		2020	8
	MICROPHONE WIRELESS	2013	1
	MIKRITIK ROUTER VPN	2016	1
	MOBIL MIXER	2013	1
	MONITOR	2002	3
	NET BOOK	2008	1
	PANEL BOK FACE EYE	2016	1
	PAPAN VISUAL	2002	2
		2010	1
	PC	2002	2
		2004	2

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
		2005	1
		2006	1
		2007	1
		2008	1
		2009	1
		2010	4
		2011	3
		2012	1
		2013	1
		2014	2
		2015	1
		2016	3
		2017	5
		2019	2
	PERKAKAS BENGKEL	2005	3
		2019	1
	PESAWAT UKUR	2002	1
	PONTON	2014	1
	PRINTER	2002	2
		2004	2
		2005	1
		2006	2
		2007	2
		2008	6

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
		2010	1
		2011	7
		2012	2
		2013	2
		2014	3
		2015	2
		2016	7
		2017	3
		2018	2
		2019	2
	PRINTER DOT MATRIK	2013	1
	PROYEKTOR	2002	1
		2015	1
		2016	1
		2017	1
	PROYEKTOR + ATTACHMENT	2019	1
	RAK KAYU	2019	2
	SALON KOMPUTER	2002	1
	SCANNER	2006	1
		2010	1
		2015	1
	SELANG PENYEMPROT AIR	2018	1
	SONDIR	2018	1
	SOUND SYSTEM	2002	1

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
		2015	3
	STABILISATOR	2002	1
	STAVOLT	2002	1
	STOOM WALS	2017	1
	SWITCH HUB-D-Link4 Port	2016	1
	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	2009	1
	TANDON AIR	2017	1
	TANGGA	2020	1
	TANGGA ALUMINIUM	2008	1
		2016	1
	TANGGA PORTABLE	2014	2
	TELEPON PABX	2007	2
		2018	10
	TELEPONE	2002	3
		2011	2
	TELEPONE PHBX	2010	1
	TELEVISI	2002	1
		2013	1
		2015	1
	TEST PRESS/STERGHT TEST	2009	5
	THEODOLITE	2002	1
	THERMOMETER	2020	1
	TRALIS BESI	2016	1
	UNIT POWER SUPPLY	2002	1

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
	UPS STABILISER PROLINK	2014	1
	VACUM CLEANER	2002	1
		2007	1
	WIRELESS AMPLIFIER	2019	1

Sumber: Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan

Menurut tabel 2.3 di atas masih terdapat banyak sekali asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan yang tahun perolehannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Secara kondisi, masih banyak asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kondisi rusak, sehingga dalam periode renstra 2021-2026 direncanakan akan dilakukan penghapusan terhadap beberapa asset yang dalam kondisi rusak. Selain akan dilakukannya penghapusan, guna meningkatkan kualitas pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka akan dilaksanakan pengadaan asset baru seperti laptop kendaraan dinas dll.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan saat ini untuk Meningkatkan kondisi serta Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan, dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menitikberatkan pada Kualitas Jalan Kota, Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air, Kualitas Penataan Ruang dan Kualitas Bangunan Gedung Negara.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6					7					8 = (7/6)				
1	Persentase Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kota	-	-	√	-	25%	-	-	-	-	25%	-	-	-	-	100%	-	-	-
2	Presentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	-	-	√	-	40%	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	100%	-	-	-
3	Prosentase Prasarana ke-PU-an yang layak digunakan	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-
4	Persentase Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang	-	-	√	-	60%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	100%	-	-	-
5	Persentase luasan pemanfaatan	-	-	√	-	30%	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	100%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	ruang yang ditingkatkan																		
6	Persentase Ketaatan terhadap rencana Tata Ruang	-	-	√	-	82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%	-	-	-
7	Persentase Kondisi Bangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan yang Terbangun	-	-	√	-	40%	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	100%	-	-	-
8	Prosentase Kualitas Mutu Bahan Bangunan & Konstruksi	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-
9	Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-
10	Persentase Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	-	-	√	-	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
11	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk pertanian rakyat	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-
12	Persentase jaringan Air Irigasi yang terpelihara	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%			
13	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm, selama 2 Jam) lebih dari 2 kali setahun	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-
14	Persentase Jaringan Drainase Kota yang terpelihara sesuai umur Teknis	-	-	√	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-
15	Prosentase pengembangan	-	-	√	-	10%	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	100%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	dan pengelolaan IPLT																		
16	Persentase Peningkatan Gedung Negara yang berkualitas	-	-	√	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-
17	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	98,09%	96,86%	-	-	100%	98%	96,86%
18	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Berfungsi layak	-	-	√	-	-	90%	100%	100%	-	-	90%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
19	Persentase terpenuhinya kebutuhan seragam khusus dan perlengkapannya	-	-	√	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%		-	-	-	100%	
20	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	√	-	-	73%	-	0%	-	-	73%	100%	0%	-	-	100%	-	0,00%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
21	Persentase personil yang mengikuti pebingkatan kapasitas SDM	-	-	√	-	-	79%	79%	79%	-	-	79%	80%	79%	-	-	100%	101%	100%
22	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
23	Presentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	-	-	√	-	-	67,19%	-	-	-	-	79,11%	-	-	-	-	118%	-	-
24	Persentase Ketersediaan Jalan dan Bangunan Pelengkapanya	-	-	√	-	-	42,63%	-	-	-	-	41,90%	-	-	-	-	98%	-	-
25	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan sedang	-	-	√	-	-	84,00%	-	-	-	-	81,51%	-	-	-	-	97%	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
26	Persentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	-	-	√	-	-	98,72%	-	-	-	-	98,71%	-	-	-	-	100%	-	-
27	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	-	-	√	-	-	98,70%	-	-	-	-	98,65%	-	-	-	-	100%	-	-
28	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	-	-	√	-	-	81,50%	-	-	-	-	81,50%	-	-	-	-	100%	-	-
29	Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi	-	-	√	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-
30	Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi	-	-	√	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-
31	Persentase pemanfaatan	-	-	√	-	-	-	99,84%	-	-	-	-	98,65%	-	-	-	-	99%	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang																		
32	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	-	-	√	-	-		82,68%	-	-	-	-	82,28%	-	-	-	-	99,52 %	-
33	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan sedang	-	-	√	-	-	-	76,65%	-	-	-		76,02%	-	-	-	-	99,18 %	-
34	Persentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	-	-	√	-	-	-	98,86%	-	-	-		98,80%	-	-	-	-	100%	-
35	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	-	-	√	-	-	-	68,95%	-	-	-		79,79%	-	-	-	-	116%	-
36	Persentase Ketersediaan Jalan dan	-	-	√	-	-	-	45,13%	-	-	-		43,16%	-	-	-	-	96%	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Bangunan Pelengkapanya																		
37	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	-	-	√	-	-	-	-	99,84%	-	-	-	-	98,65%	-	-	-	-	98,81%
38	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	-	-	√	-	-	-	-	83,86%	-	-	-	-	82,28%	-	-	-	-	98,12%
39	Presentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa konstruksi	-	-	√	-	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	87,50%
40	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	-	-	√	-	-	-	-	79,40%	-	-	-	-	76,36%	-	-	-	-	96,17%
41	Presentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	-	-	√	-	-	-	-	99,00%	-	-	-	-	98,86%	-	-	-	-	99,86%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
42	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	-	-	√	-	-	-	-	71,08%	-	-	-	-	80,78%	-	-	-	-	113,65 %
43	Persentase ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap	-	-	√	-	-	-	-	47,63%	-	-	-	-	43,35%	-	-	-	-	91,01%
44	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	-	-	√	-	-	50%	-	-	-	-	26%	-	-	-	-	51,56 %	-	-
45	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	√	-	-	-	29,83%	50%	-	-	-	26%	26,27%	-	-	-	87,16 %	52,54%

Pada tahun 2017 terjadi perubahan kelembagaan, dari yang awalnya bernama Dinas Pekerjaan Umum kemudian berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan 13 Program. Pada tahun 2020 terjadi pengerucutan program sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan 10 program.

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa pada indikator Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang memiliki capaian realisasi di atas 100%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan SK Walikota Nomor 188/237/423.011/2018 yang berisi tentang perubahan aset jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dampak dari perubahan kelembagaan sehingga aset jalan Dinas Pekerjaan Umum dibagi menjadi aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan dan Penataan Ruang serta aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Selain itu, dapat pula diketahui bahwa capaian realisasi dari indikator Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih di bawah 70%. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2018 belum ada pembebasan lahan yang berhasil dilakukan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pasuruan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.976.384.900	1.343.148.000	636.050.000	1.424.719.500	979.627.000	9.887.132.352	1.190.447.130	549.451.990	1.068.827.119	862.245.601	99,1 1%	88,6 3%	86,3 9%	75,0 2%	88,02 %	- 11,61 %	-16,65%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.994.649.000	264.272.000	485.590.000	1.002.093.000	593.779.050	1.882.923.337	245.573.300	415.670.216	871.907.590	480.429.197	94,4 0%	92,9 2%	85,6 0%	87,0 1%	80,91 %	15,65 %	11,79%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	178.677.000	77.700.000	43.500.000	43.560.000		176.195.700	76.914.000	42.889.000	42.660.000		98,6 1%	98,9 9%	98,6 0%	97,9 3%	-	- 50,10 %	-50,28%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.290.000	68.760.000	50.760.000	37.799.800	14.199.800	27.434.200	51.742.500	35.290.500	36.994.000	10.004.500	87,6 8%	75,2 5%	69,5 2%	97,8 7%	70,46 %	1,40%	-2,83%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	88.000.000	75.000.000	25.400.000	124.855.000	48.259.250	86.957.100	72.807.000	24.873.625	64.359.500	31.987.400	98,81%	97,08%	97,93%	51,55%	66,28%	62,33%	6,58%
Program pembangunan jalan dan jembatan	43.865.510.000	35.000.000	-	-	-	37.878.567.552	19.154.600	-	-	-	86,35%	54,73%	-	-	-	-49,98%	-49,99%
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.412.395.000	-	-	-	-	4.091.102.838	-	-	-	-	92,72%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	17.032.645.000	19.346.073.000	-	-	-	15.489.992.008	16.864.781.020	-	-	-	90,94%	87,17%	-	-	-	-21,60%	-22,78%
Program Peningkatan Sarana & Prasarana	843.548.000	-	-	-	-	832.347.660	-	-	-	-	98,67%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Kebinaamargaan																	
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	9.417.890.000	-	-	-	-	8.582.284.581	-	-	-	-	91,13%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pengendalian Banjir	562.500.000	-	-	-	-	491.347.400	-	-	-	-	87,35%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.525.205.500	-	1.075.508.000	-	-	2.367.673.350	-	1.031.359.250	-	-	93,76%	-	95,90%	-	-	-50,00%	-50,00%
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur	112.500.000	3.223.012.160	-	-	-	106.093.852	3.223.012.160	-	-	-	94,31%	100,00%	-	-	-	666,22%	709,47%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Perumahan	2.620.769.300	-	-	-	-	2.447.007.612	-	-	-	-	93,37%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Lingkungan Sehat Perumahan	3.937.711.200	-	-	-	-	2.583.308.595	-	-	-	-	65,60%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	785.013.500	-	-	-	-	739.793.050	-	-	-	-	94,24%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	6.303.605.000	-	-	-	-	5.789.429.620	-	-	-	-	91,84%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Penataan Tata Ruang	1.304.750.000	-	-	-	-	1.221.726.922	-	-	-	-	93,64%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	9.590.347.250	-	-	-	-	8.702.076.905	-	-	-	-	90,74%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Persampahan																	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.243.738.000	-	-	-	-	4.658.229.435	-	-	-	-	88,83%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	3.619.467.000	-	-	-	-	3.286.987.865	-	-	-	-	90,81%	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	39.046.650.000	32.715.900.000	21.098.175.000	31.636.400.000	24.625.263.900	4.662.657.900	3.683.210.750	284.374.900	985.452.891	116.831.238	11,94%	11,26%	1,35%	3,11%	0,47%	-5,98%	11,28%
Program Peningkatan Prasarana Ke-PU-an	-	1.123.700.000	-	-	-	-	888.683.893	-	-	-	-	79,09%	-	-	-	-25,00%	-25,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Tata Ruang	-	805.000.000	-	-	-	-	710.412.876	-	-	-	-	88,25%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pemanfaatan Ruang	-	625.000.000	-	-	-	-	457.293.990	-	-	-	-	73,17%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	145.000.000	-	-	-	-	100.078.940	-	-	-	-	69,02%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pembangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan	-	1.952.722.900	-	-	-	-	1.440.717.600	-	-	-	-	73,78%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Peningkatan Median, Trotoar dan Drainase Jalan	-	5.088.500.000	-	-	-	-	4.919.665.775	-	-	-	-	96,68%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pengawasan Kualitas	-	217.950.000	-	-	-	-	196.451.700	-	-	-	-	90,14%	-	-	-	-25,00%	-25,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Mutu Bahan Bangunan & Konstruksi																	
Program Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	110.000.000	74.475.000	134.000.000	-	-	81.496.000	70.565.000	114.288.800	-	-	74,09%	94,75%	85,29%	-	-13,09%	-12,86%
Program Peningkatan Tertib pembangunan Bangunan Gedung	-	351.029.000	-	22.960.460.000	-	-	332.416.500	-	11.131.719.002	-	-	94,70%	-	48,48%	-	-50,00%	-50,00%
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Air Irigasi	-	6.118.452.000	3.597.205.000	6.412.495.000	-	-	5.747.066.656	3.373.082.280	5.231.154.573	-	-	93,93%	93,77%	81,58%	-	-15,74%	-21,56%
Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	1.525.000.000	-	-	-	-	1.465.235.118	-	-	-	-	96,08%	-	-	-	-25,00%	-25,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pembangunan Drainase Kota	-	2.069.500.000	-	-	-	-	1.920.243.600	-	-	-	-	92,79%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Program Pemeliharaan Drainase Kota	-	730.000.000	-	11.968.277.200	-	-	707.883.859	-	9.710.005.209	-	-	96,97%	-	81,13%	-	-50,00%	-50,00%
Program pengembangan dan pengelolaan IPLT	-	2.555.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-25,00%	0,00%
Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Negara	-	71.380.449.500	-	-	8.693.344.350	-	59.451.777.775	-	-	8.682.743.665	-	83,29%	-	-	99,88%	-25,00%	-25,00%
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan	-	-	64.610.141.500	-	-	-	2.401.222.180	58.931.491.348	-	-	-	-	91,21%	-	-	-25,00%	563,56%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
dan Bangunan Pelengkapnya																	
Program Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan bangunan pelengkapya	-	-	7.711.274.500	-	-	-	-	6.401.106.500	-	-	-	-	-	83,01%	-	-	-25,00%
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kota	-	-	5.613.711.500	-	-	-	-	5.277.262.197	-	-	-	-	-	94,01%	-	-	-25,00%
Program Penataan Ruang	-	-	1.370.362.000	2.689.703.000	543.641.800	-	-	520.775.344	674.535.800	196.022.450	-	-	38,00%	25,08%	36,06%	4,12%	-10,35%
Program Peningkatan Bangunan Gedung	-	-	16.300.035.000	-	-	-	-	15.013.608.000	-	-	-	-	-	92,11%	-	-	-25,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	-	18.677.439.700	-	-	-	-	12.146.792.058	-	-	-	-	65,03%	-	-25,00%	-25,00%
Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	-	-	-	3.474.867.500	-	-	-	-	2.556.974.350	-	-	-	-	73,58%	-	-25,00%	-25,00%
Program Peningkatan Penataan Bangunan Gedung dan Pembinaan Konstruksi	-	-	-	-	2.568.737.000	-	-	-	-	2.273.569.047	-	-	-	-	88,51%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Drainase Irigasi dan	-	-	-	-	4.469.153.500	-	-	-	-	3.592.228.045	-	-	-	-	80,38%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Drainase Kota																	
Program Peningkatan / Pengembangan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkapny a	-	-	-	-	8.344.139.250	-	-	-	-	3.326.449.385	-	-	-	-	39,87 %	0,00%	0,00%

Berdasarkan realisasi penyerapan anggaran, pada tahun 2020 program Penataan Ruang melakukan penyerapan anggaran kurang dari 50%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, proses pengesahan dokumen Revisi RTRW Kota Pasuruan masih belum rampung.

Selain itu, selama periode renstra 2016 – 2021, Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah memiliki realisasi penyerapan anggaran paling sedikit. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya kegiatan pembebasan tanah baik untuk jalan tembus maupun untuk pengadaan tanah Jalan Lingkar Utara.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi kesenjangan antar kawasan.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah dan penataan ruang ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip *memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui metode SWOT dan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, telaah RTRW dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

1. Tantangan

- Memberikan pelayanan kondisi mantap jalan
- Menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas

2. Peluang Pengembangan Pelayanan`

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana jalan mulai dari (jalan menuju) jalan Arteri hingga jalan lingkungan guna mewujudkan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kota Pasuruan pada Khususnya
- Memberikan kenyamanan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor di lingkup Kota Pasuruan pada umumnya

b. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

1. Tantangan

- Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll

c. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

1. Tantangan

- Meningkatnya teknologi konstruksi untuk pembangunan yang harus berwawasan lingkungan
- Meningkatnya industri konstruksi

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Pendataan sarana prasarana Bangunan Gedung
- Pedoman untuk industri konstruksi

d. Bidang Tata Ruang

1. Tantangan

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan pemanfaatan ruang
- Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat
- Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
- Meningkatkan koordinasi teknis dalam pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik di masyarakat

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peran serta penataan ruang
- Mengembangkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang
- Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
- Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pengendalian dan pemanfaatan ruang

e. Sekretariat

1. Tantangan

- Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja

2. Peluang Pengembangan Pelayanan

- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS

Berdasarkan uraian di atas, maka tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dipetakan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4

Kertas Kerja untuk Identifikasi Tantangan dan Peluang (dengan Renstra K/L) pada Sub Bab 2.4

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial				
Indikator Sasaran: 1. Indeks Kualitas Jalan	Sasaran Strategis kedua (SS-2): Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional			
	Indikator SS-2 : 1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Memberikan pelayanan kondisi mantap jalan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana jalan guna mewujudkan

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
				meningkatnya perkembangan perekonomian di Kota Pasuruan
			Menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas	Memberikan kenyamanan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor di lingkup Kota Pasuruan
2. Indeks Layanan Drainase	Sasaran Strategis pertama (SS-1): Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Indikator SS-1 :			
	1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;			
	2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;	Kapasitas saluran drainase menurun	Mengurangi resiko banjir	Peningkatan pelayanan penanganan banjir
	3. Kapasitas tampung per kapita; 4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan	Pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
			dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal	
3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara		Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	Meningkatnya teknologi konstruksi untuk pembangunan yang harus berwawasan lingkungan	Pendataan sarana prasarana Bangunan Gedung
			Meningkatnya industri konstruksi	Pedoman untuk industri konstruksi

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Sasaran Strategis ketiga (SS-3): Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau			
	Indikator SS-3 :			
	1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;			
	2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;			
	Sasaran Strategis keempat (SS-4): Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Indikator SS-4 :			
	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;			
	2. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.			
4. Indeks Penataan Ruang		Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat	Mengembangkan teknologi informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
			Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
		Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan pemanfaatan ruang	Meningkatkan kesadaran masyarakat dala peran serta penataan ruang
			Meningkatkan koordinasi teknis dalam pengendalian dan monitoring	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
			pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik di masyarakat	rencana pengendalian dan pemanfaatan ruang
		Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Meningkatkan koordinasi teknis dalam rencana pembebasan lahan untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara
Sasaran: Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Indikator: 1. Nilai SAKIP SKPD 2. Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti 3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	Indikator SS-5 :	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS
	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;			
	2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;			
	3. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;			
	4. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	5. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;			
	6. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.			

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan permasalahan tersebut dibagi berdasarkan indikator – indikator sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Renstra Kementrian Pekerjaan Umum. Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ada jalan yang kondisinya belum mantab untuk indikator sasaran renstra PD yaitu indeks kualitas jalan dan indikator sasaran renstra Kementrian Pekerjaan Umum yaitu waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km) al ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tantangannya adalah bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan agar dapat memberikan pelayanan kondisi mantab jalan serta menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan di Kota Pasuruan. Sedangkan peluangnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat meningkatkan kondisi sarana dan prasarana jalan serta memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan di Kota Pasuruan.

Tabel 2. 5

Kertas Kerja untuk Identifikasi Tantangan dan Peluang (dengan Renstra PD Provinsi) pada Sub Bab 2.4

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial				
Indikator Sasaran: 1. Indeks Kualitas Jalan	Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur			
	Sasaran 1:			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
	Indiaktor 1: Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Sasaran 2: Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Memberikan pelayanan kondisi mantap jalan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana jalan guna mewujudkan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kota Pasuruan
	Indikator 2: Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanan/ Level of Service (LoS) minimal B		Menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas	Memberikan kenyamanan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor di lingkup Kota Pasuruan
2. Indeks Layanan Drainase	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan			
	Indikator 1: Indeks Ketahanan Air			
	Sasaran 2: Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/ Pembuang yang diperbaiki	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian	Pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Indikator 2: % Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik		bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan	
	Sasaran 3: Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat			
	Indikator 3: % tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi		produksi pertanian akan optimal	

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Sasaran 4: Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Kapasitas saluran drainase menurun	Mengurangi resiko banjir	Peningkatan pelayanan penanganan banjir
	Indikator 4: % Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir			
	Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Indikator 5: Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS
3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur			
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Indikator 1: Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS
	Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	kebutuhan hunian dan permukiman yang layak			
	Indikator 2: Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni			
	Sasaran 3: Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan			
4. Indeks Penataan Ruang	Indikator 3: Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah	Mengembangkan teknologi informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
			kepada semua lapisan masyarakat	masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang
			Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
		Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan pemanfaatan ruang	Meningkatkan kesadaran masyarakat dala peran serta penataan ruang

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
			Meningkatkan koordinasi teknis dalam pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pengendalian dan pemanfaatan ruang
		Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	Meningkatnya teknologi konstruksi untuk pembangunan yang harus berwawasan lingkungan	Pendataan sarana prasarana Bangunan Gedung
			Meningkatnya industri konstruksi	Pedoman untuk industri konstruksi

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
		Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Meningkatkan koordinasi teknis dalam rencana pembebasan lahan untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan permasalahan tersebut dibagi berdasarkan indikator – indikator sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Renstra pada PD Provinsi. Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi adalah Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang untuk indikator sasaran renstra PD yaitu indeks penataan ruang dan indikator sasaran renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yaitu Persentase penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tantangannya adalah bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan agar dapat mengoptimalkan rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat serta meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang. Sedangkan peluangnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengembangkan teknologi informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 6

Pemetaan Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaah RTRW

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Perwujudan Struktur Ruang	Kelurahan Kebonsari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Tata Ruang sebagai perencana	Kesulitan dalam memperoleh data rencana perwujudan struktur ruang dalam bentuk peta	Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat	Mengembangkan teknologi informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan
Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan					
Pusat Pelayanan Kota					
Pusat Pemerintahan skala kota			lokasi yang diberikan kepada bidang tata		

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pusat peribadatan skala kota	Kelurahan Kebonsari	struktur ruang Kota	ruang kurang akurat		pemanfaatan ruang
Subpusat Pelayanan Kota Kota Barat		Pasuruan membuat kajian yang dijadikan	Data yang tersedia kurang update	Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan	Meningkatkan pengembangan program kegiatan
Pusat Peribadatan	Kelurahan Karangketug	sebagai acuan		sebagai pedoman	penataan ruang
Subpusat Pelayanan Kota Timur		dalam perencanaan dan	Kurangnya SDM yang ahli dalam penataan ruang	pemanfaatan ruang dalam mendukung	
Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Blandongan	pembangunan infrastruktur			

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pusat perkantoran skala kota	Kelurahan Blandongan			pembangunan berkelanjutan	
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi			Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Memberikan pelayanan kondisi mantap jalan serta menciptakan situasi yang baik bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas	Meningkatkan Sarana dan Prasarana jalan guna mewujudkan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kota Pasuruan serta memberikan
Sistem Jaringan Jalan					
Jalan Umum					
Pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Ruas jalan Airlangga				
	ruas jalan Panglima Sudirman				
	ruas jalan KH. Wachid Hasyim Utara				
	ruas jalan KH. Wachid Hasyim Selatan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Hayam Wuruk				kenyamanan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor di lingkup Kota Pasuruan
	ruas jalan Diponegoro				
	ruas jalan Kartini				
	ruas jalan Gajah Mada				
	ruas jalan Hasanudin				
	ruas jalan Balaikota				
	ruas jalan Pahlawan				
	ruas jalan Slagah				
	ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo				
	ruas jalan Kartenegro				
	ruas jalan Brawijaya				
	ruas jalan Lingkar Utara				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	ruas jalan Brigjend Slamet Riyadi				
	ruas jalan Raden Patah				
	ruas jalan Adi Sucipto				
	ruas jalan I Gusti Ngurah Rai				
	ruas jalan Jaksa Agung Suprpto				
	ruas jalan Sulawesi				
	ruas jalan Nias				
	ruas jalan Dr. Sutomo				
	ruas jalan Sultan Agung				
	ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo				
	ruas jalan Ki Hajar Dewantara				
	ruas jalan KH. Mansyur				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Patiunus				
	ruas jalan Patimura				
	ruas jalan Letjend MT. Haryono				
	ruas jalan alun-alun				
	ruas jalan WR. Supratman				
	ruas jalan Sunan Ampel				
	ruas jalan RE. Martadinata				
	ruas jalan Halmahera				
	ruas jalan Letjend S. Parman				
	ruas jalan Kom. Yos Sudarso				
	ruas jalan Raden Wijaya				
	ruas jalan Dharmawangsa				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Antasari				
	ruas jalan Iskandar Muda				
	ruas jalan dr. Moestopo				
Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	ruas jalan Menara				
	ruas jalan TB Simatupang				
	ruas jalan Teuku Umar				
	ruas jalan Ade Irma Suryani Nasution				
	ruas jalan AH Nasution				
	ruas jalan Pasar Meubel Randusari				
	ruas jalan Cendana				
	ruas jalan Jati				
	ruas jalan Ulin				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Lombok				
	ruas jalan Maluku				
	ruas jalan Kumala				
	ruas jalan Kalimantan				
	ruas jalan Banda				
	ruas jalan Irian Jaya				
	ruas jalan Sisingamangaraja XII				
	ruas jalan Krapyakrejo				
	ruas jalan Jolondriyo				
	ruas jalan Jolodaran				
	ruas jalan Purut				
	ruas jalan Margo Utomo				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Mangga				
	ruas jalan R.W. Monginsidi				
	ruas jalan Tirtayasa				
	ruas jalan Simpang Airlangga				
	ruas jalan Margo Taruno				
	ruas jalan Basuki Rachmat				
	ruas jalan Kebon Mangga				
	ruas jalan Supriadi				
	ruas jalan Sastro Surotoko				
	ruas jalan Rajawali				
	ruas jalan Kyai Syarkowi				
	ruas jalan Kyai Muso				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Kyai Supik				
	ruas jalan KH. Agus Salim				
	ruas jalan KH. Samanhudi				
	ruas jalan Sekargadung				
	ruas jalan Sekarsono				
	ruas jalan Trunojoyo				
	ruas jalan Cakraningrat				
	ruas jalan Kepel				
	ruas jalan Terusan Kepel				
	ruas jalan Kepel Utara				
	ruas jalan Tapaan				
	ruas jalan Imam Bonjol				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Cemara				
	ruas jalan HOS Cokroaminoto I				
	ruas jalan HOS Cokroaminoto II				
	ruas jalan KH. Hasyim Ashari II				
	ruas jalan Sambirejo				
	ruas jalan Kejobo Lor				
	ruas jalan Jelakrejo I				
	ruas jalan Jelakrejo II				
	ruas jalan Bitingan				
	ruas jalan Glagah				
	ruas jalan Wiroguno				
	ruas jalan Dewi Sartika				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan KH. Abdul Hamid				
	ruas jalan Terusan KH. Abdul Hamid				
	ruas jalan Sumatera				
	ruas jalan Terusan Sumatera				
	ruas jalan Belitung				
	ruas jalan Terusan Belitung				
	ruas jalan Pierre Tendean				
	ruas jalan Brigjen Katamso				
	ruas jalan Stasiun				
	ruas jalan Kolonel Sugiono				
	ruas jalan Kalianget				
	ruas jalan Hang Tuah				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Sutan Syahrir				
	ruas jalan M. Yamin				
	ruas jalan Mojopahit I				
	ruas jalan Mojopahit II				
	ruas jalan Brantas				
	ruas jalan Musi				
	ruas jalan Mahakam				
	ruas jalan Barito				
	ruas jalan Asahan				
	ruas jalan KH. Wahab Hasbullah				
	ruas jalan Terusan Piere Tendean				
	ruas jalan Simpang Teuku Umar				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	ruas jalan Simpang Ade Irma Suryani Nasution				
	ruas jalan Kyai Sepuh				
	ruas jalan Karangketug				
Pengembangan Jalan Baru	Jalan Lingkar Utara dan Jalan Karangketug		Belum terrealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Meningkatkan koordinasi teknis dalam rencana pembebasan lahan untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Perwujudan Sistem Jaringan Energi			Kesulitan dalam memperoleh data rencana perwujudan struktur ruang dalam bentuk peta	Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrika					
Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan sarana pendukung					
Pengembangan fiber optic dan microcell	Seluruh wilayah kota		Data yang tersedia kurang update		

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air			Kurangnya SDM yang bertugas dalam penanganan banjir	Mengurangi resiko banjir	Peningkatan pelayanan penanganan banjir
Prasarana Sumber Daya Air					
Sistem Pengendalian Banjir					
Pengembangan bangunan pengendali banjir	Kelurahan Karangketug				
	Kelurahan Blandongan				
	Kelurahan Ngemplakrejo				
	Kelurahan Panggungrejo				
	Kelurahan Ngemplakrejo				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan rumah pompa	Kelurahan Panggungrejo				
	Kelurahan Karangketug				
Penyediaan alat pengendali Rob	Kelurahan Ngemplakrejo				
	Kelurahan Panggungrejo				
	Kelurahan Karangketug				
Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori	Seluruh Kota				
Pengerukan sungai secara berkala	Seluruh Kota				
Pemeliharaan Bangunan	Kelurahan Blandongan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Sumber Daya Air (DAM Binting)					
Perwujudan Infrastruktur Perkotaan			Kurangnya tenaga ahli dalam bidang penataan ruang, data yang dibutuhkan kurang update, kesulitan dalam	Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam	Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan Sistem pembuangan air limbah non domestik	Kelurahan Kelurahan Purutreja, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Tembokreja, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Panggungreja, Kelurahan Mandaranreja dan Kelurahan Ngemplakreja		memperoleh data dalam bentuk peta serta data lokasi yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang sesuai	mendukung pembangunan berkelanjutan	
Pengembangan Sistem pembuangan air limbah domestik	IPAL Purworejo, IPAL Gadingreja, IPAL Bugul Kidul, IPAL Panggungreja, Pengolahan Lindi di Tempat Pengolahan Akhir Blandongan, IPLT di Kelurahan Blandongan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bakalan, Kelurahan Mandaranreja, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Ngemplakreja, Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Panggungrejo, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Trajeng, dan Kelurahan Karanganyar				
Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Purutrejo				
Sistem jaringan persampahan					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan TPS3R	1. Kelurahan Karanganyar; 2. Kelurahan Bugul Lor; 3. Kelurahan Tembokrejo; 4. Kelurahan Purutrejo; 5. Kelurahan Blandongan; 6. Kelurahan Krampyangan; 7. Kelurahan Karangketug; 8. Kelurahan Sebani; 9. Kelurahan Gadingrejo; 10. Kelurahan Randusari; dan 11. Kelurahan Bukir.				
Pengembangan TPA Regional	Kota Pasuruan				
Pengembangan Bio Energy di TPA	Kelurahan Blandongan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Sistem Drainase			Kurangnya SDM yang bertugas dalam normalisasi saluran	Mengurangi resiko banjir	Peningkatan pelayanan penanganan banjir
Normalisasi saluran primer	1. Sungai Gembong; 2. Sungai Petung; dan 3. Sungai Welang				
Pembangunan dan normalisasi saluran sekunder	Seluruh Kecamatan kota				
Pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier	seluruh Kota Pasuruan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Sistem Jaringan Pejalan Kaki			Belum semua jalan memiliki trotoar	Menyediakan trotoar yang memperhatikan gender	Menyediakan trotoar bagi pejalan kaki sehingga memberikan rasa nyaman bagi pejalan kaki di Kota Pasuruan
Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum	1. Jalan A. Yani; 2. Jalan Soekarno-Hatta; 3. Jalan D.I Panjaitan; 4. Jalan Letjen Suprpto; 5. Jalan Veteran; 6. Jalan Ir. Juanda; 7. Jalan Gatot Subroto; 8. Jalan Urip Sumoharjo; 9. Jalan Untung Suropati; 10. Jalan Dr. Setiabudi; 11. Jalan K.H. Hasyim Ashari; 12. Jalan HOS. Cokroaminoto; 13. Jalan Sulawesi; 14. Jalan KH. Wachid Hasyim; 15. Jalan Panglima Sudirman; 16. Jalan Pahlawan; dan 17. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo.				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Perwujudan Pola Ruang	seluruh kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Tata Ruang sebagai perencana pola ruang Kota Pasuruan membuat kajian yang	Kurangnya tenaga ahli dalam bidang penataan ruang, data yang dibutuhkan kurang update, kesulitan dalam memperoleh data dalam bentuk peta serta data lokasi yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatkan ketersediaan rencana detail kawasan sebagai pedoman pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan program kegiatan penataan ruang
Perwujudan Kawasan Lindung					
Pengendalian dan pemeliharaan Badan Air					
Kawasan perlindungan setempat					
Pengendalian alihfungsi dengan penetapan Sempadan Sungai					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Penetapan sungai bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai	Sungai Gembong, Sungai Welang dan Sungai Petung	dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur	dan Penataan Ruang kurang sesuai		
Penetapan sungai tidak bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan	Sungai Gembong, Sungai Welang dan Sungai Petung				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)					
Perwujudan Kawasan Budidaya					
Pemeliharaan Badan Air	seluruh kota				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Kawasan Pertanian					
Kawasan tanaman pangan					
Mempertahankan kawasan tanaman pangan	1. Kelurahan Bakalan; 2. Kelurahan Blandongan; 3. Kelurahan Bugul Kidul; 4. Kelurahan Kepel; 5. Kelurahan Krampyangan; 6. Kelurahan Gadingrejo; 7. Kelurahan Gentong; 8. Kelurahan Karangketug; 9. Kelurahan Krapyakrejo; 10. Kelurahan Sebani; 11. Kelurahan Karanganyar; 12. Kelurahan Petamanan; 13. Kelurahan Kebonagung; 14. Kelurahan Pohjentrek; 15. Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Purutrejo; 16. Kelurahan Sekargadung; 17. Kelurahan Tembokrejo; dan 18. Kelurahan Wirogunan.				
Pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Bakalan				
Kawasan Pariwisata					
Pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada	Seluruh kota				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan kawasan wisata buatan	Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan Sekargadung				
Kawasan Permukiman					
Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Petahunan, Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	Randusari, Kelurahan Seban, Kelurahan Bangilan, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Kandangsapi, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Petamanan, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Trajeng, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tembokreja dan Kelurahan Wirogunan				
Pengembangan Kawasan Perkantoran	seluruh kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Perwujudan Kawasan Strategis Kota					
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi					
Kawasan wisata bahari	Kelurahan Blandongan dan Kepel				
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Kompleks kawasan bekas bangunan kolonial	Pelabuhan – Jalan Balaikota – Jalan Pahlawan				
Kawasan pecinan	Kelurahan Trajeng				
Kawasan religi sekitar Masjid AlAnwar	Kelurahan Kebonsari				

Berdasarkan indikasi program pembangunan RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan khususnya Bidang Tata Ruang bertugas untuk menentukan rencana pola ruang serta rencana struktur ruang di Kota Pasuruan. Terkait pelaksanaan kegiatan untuk masing – masing indikasi program pembangunan RTRW dilakukan oleh masing – masing instansi terkait.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikasi program pembangunan RTRW adalah sulitnya mendapat data rencana perwujudan struktur ruang dalam bentuk peta, kurangnya tenaga ahli yang kompeten di bidang penataan ruang serta data yang diberikan kurang update. Permasalahan ini menjadi tantangan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal Mengoptimalkan informasi rencana tata ruang wilayah kepada semua lapisan masyarakat.

Selain sebagai tantangan, permasalahan yang muncul juga dapat dijadikan sebagai peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal Mengembangkan teknologi informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 7

Pemetaan Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaah KLHS

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Konflik Tata Ruang, Penyediaan Pangan dan Air Kota Pasuruan	Membangun tangkapan air di walayah perumahan	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal	Pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll
	Mengefisiensikan penggunaan air untuk kebutuhan domestik irigasi lahan pertanian, dan industri			
Kualitas Permukiman, Pengendalian	Membangun tangkapan air di walayah perumahan	Kapasitas saluran drainase menurun	Mengurangi resiko banjir	Peningkatan pelayanan penanganan banjir
	Pengerukan sungai			

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Banjir dan Persampahan Kota Pasuruan	Penetapan tata ruang lahan sempadan sungai			
	Penentuan baku mutu kelas air sungai			
	Penentuan daya tampung beban pencemaran air sungai			
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai			
	Menata aktivitas kota dengan konsep bebas lahan terdegradasi dengan menerapkan penggunaan lahan campuran			

Pada Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026, terdapat 4 (empat) isu strategis yaitu:

1. Konflik Tata Ruang, Penyediaan Pangan dan Air;
2. Kualitas Permukiman, Pengendalian Banjir dan Persampahan;
3. Daya Saing SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan; dan
4. Pemerataan Kesejahteraan

Dari keempat isu – isu strategis di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turut serta sebagai penanggungjawab pada skenario pembangunan berkelanjutan untuk 2 (dua) isu strategis yakni skenario pembangunan berkelanjutan untuk isu konflik tata ruang, penyediaan pangan dan air serta pada skenario pembangunan berkelanjutan untuk isu kualitas permukiman, pengendali banjir dan persampahan.

Pada skenario pembangunan berkelanjutan untuk isu konflik tata ruang, penyediaan pangan dan air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggungjawab untuk membangun tangkapan air di wilayah perumahan serta mengefisiensikan penggunaan air untuk kebutuhan domestik irigasi lahan pertanian, dan industri. Permasalahan yang dihadapi pada skenario pembangunan berkelanjutan ini adalah tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai). Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang karena luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal. Melihat permasalahan tersebut, maka terdapat peluang yang dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna meningkatkan kualitas perlayannya. Peluang yang

dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melakukan pengembangan pelayanan terhadap penyediaan air irigasi, dengan perbaikan saluran irigasi, bangunan bagi, bangunan sadap, pintu air dll.

Sedangkan pada skenario pembangunan isu kualitas permukiman, pengendali banjir dan persampahan, terdapat 7 (tujuh) hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku penanggungjawab. Skenario pembangunan berkelanjutan tersebut diantaranya:

1. Membangun tangkapan air di wilayah perumahan;
2. Pengerukan sungai;
3. Penetapan tata ruang lahan sempadan sungai;
4. Penentuan baku mutu kelas air sungai;
5. Penentuan daya tampung beban pencemaran air sungai;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai; dan
7. Menata aktivitas kota dengan konsep bebas lahan terdegradasi dengan menerapkan penggunaan lahan campuran.

Permasalahan yang dihadapi pada skenario pembangunan berkelanjutan ini adalah turunnya kapasitas drainase sehingga mengakibatkan seringnya terjadi banjir. Untuk itu peluang yang dapat diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melakukan peningkatan pelayanan penanganan banjir guna menjawab tantangan untuk mengurangi resiko banjir.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan menemui beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut ditampilkan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Lampiran Kertas Kerja Penyajian Masalah

Permasalahan	Faktor - Faktor yang Memengaruhi	
	Internal	Eksternal
Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Revisi RTRW masih dalam proses pengesahan	kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Pengawasan dan pengendalian pemanfaataan ruang yang belum optimal	Masih ada bangunan milik warga yang melanggar ruang milik jalan dan sempadan saluran
		Masih adanya bangunan milik warga di atas saluran dan bangunan yang menggunakan/mengurangi ruang saluran
Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Terbatasnya anggaran, jumlah petugas dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan	Terdapat alih fungsi lahan dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat

Permasalahan	Faktor - Faktor yang Memengaruhi	
	Internal	Eksternal
Kapasitas saluran drainase menurun		Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan karakteristik dan tata guna lahan
Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Terbatasnya anggaran, jumlah petugas dan fasilitas pendukung pemeliharaan jalan	Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelas jalan
		Masih adanya genangan air dipermukaan jalan yang diakibatkan lubang pada lapisan jalan
Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	Terbatasnya anggaran untuk dilakukannya pembangunan gedung negara	Keterbatasan lahan aset untuk dimanfaatkan sebagai bangunan gedung Negara baik sarana pemerintahan, sosial budaya, olahraga, kesehatan, perdagangan dan pemerintahan
Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Sudah habis masa berlakunya Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/501/KPTS/013/2014 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. Sedangkan penyusunan penetapan lokasi yang baru masih menunggu perubahan trase pada Section 2	Belum didapatkannya persamaan persepsi antara Pemerintah Kota dengan warga di 3 Kelurahan dalam rangka mendapatkan kesepakatan trase pada section-2 Jalan Lingkar Utara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tujuh pokok masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuh pokok masalah tersebut yaitu masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (pada Bidang Tata Ruang), tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai) dan kapasitas saluran drainase menurun (Bidang Sumber Daya Air dan Drainase), masih adanya kondisi jalan yang belum mantab serta belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bidang Bina Marga) dan Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas pada bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi PRPJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 adalah Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”. Visi tersebut didukung dengan adanya Misi PRJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata;
4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif;

Berdasarkan Misi PRJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026 di atas, keterkaitan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk

meningkatkan kondisi serta kualitas layanan infrastruktur kota yang didukung oleh penataan ruang guna membangun Kota Pasuruan menjadi Kota yang Indah dan Nyaman melalui infrastruktur yang berkelanjutan sesuai dengan Misi 2 diwujudkan dalam program-program kerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi PASURUAN KOTA MADINAH Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya					
Misi Ke 2 Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan 1 Renstra: Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Indikator Tujuan Renstra: Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)				

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Pendukung
Sasaran 1 Renstra:	Indikator sasaran1:		1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS
Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1. Nilai SAKIP SKPD				
	2. Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti				
	3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD				

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Pendukung
Tujuan 2 Renstra:	Indikator Tujuan Renstra:				
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	1 Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan dan penataan ruang		1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Sasaran Renstra:	Indikator Sasaran Renstra:				
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	1 Indeks Kualitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait, penambahan personil serta anggaran	Terbatasnya anggaran, jumlah petugas dan fasilitas pendukung pemeliharaan jalan
				Direncanakan adanya satgas jalan berlubang yang memperbaiki jalan maksimal 48 jam	Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan klas jalan
					Masih adanya genangan air dipermukaan jalan yang diakibatkan lubang pada lapisan jalan

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				meningkatkan sosialisasi dan informasi terkait pembangunan jalan baru	Belum didapatkannya persamaan persepsi antara Pemerintah Kota dengan warga di 3 Kelurahan dalam rangka mendapatkan kesepakatan trase pada section-2 Jalan Lingkar Utara
	2 Indeks Layanan Drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait, penambahan personil serta anggaran	Terbatasnya anggaran, jumlah petugas dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan
		Program Pengelolaan dan	Kapasitas saluran drainase menurun	Perlunya pelaksanaan identifikasi saluran yang berkesinambungan	Terdapat alih fungsi lahan dikarenakan jumlah

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
		Pengembangan Sistem Drainase			penduduk yang semakin meningkat
	3 Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Program Penataan Bangunan Gedung	Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	kinerja tim serta koordinasi yang baik dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi penyediaan prasarana perkantoran	Terbatasnya anggaran untuk dilakukannya pembangunan gedung negara

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				Direncanakan adanya standarisasi sarpras publik yang ramah difabel, Revitalisasi Kawasan Alun-Alun, Revitalisasi Kawasan Kota Tua dan penataan kawasan pantai/kota tua	
	4 Indeks Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Percepatan proses pengesahan RTRW Direncanakannya adanya RTBL untuk Revitalisasi Kawasan Alun-Alun, Revitalisasi Kawasan Kota Tua dan penataan kawasan pantai/kota tua	Revisi RTRW masih dalam proses pengesahan

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal
				meningkatkan sosialisasi dan informasi terkait rencana tata ruang kepada masyarakat	kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui terdapat 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Program Prioritas tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penataan Bangunan Gedung
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program – program tersebut sekaligus untuk mendukung arah kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat
- b. Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang bersih ke masyarakat
- c. Peningkatan drainase yang berfungsi dengan baik, serta
- d. Penataan ruang yang bersih dan hijau

Dengan demikian, maka hambatan yang dihadapi oleh program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berpengaruh terhadap keberhasilan agenda prioritas serta janji politis Walikota Pasuruan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia merupakan kementrian dalam pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Renstra 2020 – 2024 adalah “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan

Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka didukung oleh beberapa Misi sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam tingkat Provinsi, Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur sepanjang 1.421,00 km yang berada pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jalan jauh lebih tinggi dari kondisi infrastruktur jalan provinsi yang ada serta terbatasnya ketersediaan anggaran untuk penanganan jalan provinsi yang ideal sesuai kondisi infrastruktur jalan yang ada.
2. Sebagian besar umur rencana jalan telah terlampaui, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan yang relatif cepat.
3. Sebagian besar lebar jalan pada jalan provinsi belum memenuhi standar jalan provinsi. Kondisi lebar jalan akhir tahun 2018, jalan provinsi yang telah memenuhi standar sebesar 48,66 % atau 691,43 km dari 1.421 km panjang Jalan Provinsi.
4. Beberapa ruas jalan, utamanya pada perkotaan dan kawasan strategis memiliki nilai VCR > 1, hal ini mengakibatkan terganggunya lalu lintas dan mempengaruhi waktu tempuh kendaraan.
5. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur (Pansela) yang sampai dengan Tahun 2018 belum tuntas dikarenakan masih ada lahan yang belum bebas.
6. Pengembangan kawasan strategis dan potensial di Wilayah Jawa Timur yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi maupun kawasan yang masuk dalam strategis provinsi.
7. Potensi Sumber Daya Manusia terus menurun yang disebabkan oleh banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan teknis yang sudah purna tugas dan mendekati purna tugas, serta belum ada penggantinya.

Untuk itu Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 bertujuan “Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas dan mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di

Jawa Timur”. Guna mencapai tujuan tersebut maka ditunjang dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial

Adapun strategi yang digunakan oleh DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah adalah :

1. Penanganan dengan cepat terhadap jalan yang rusak
2. Mempertahankan kondisi jalan yang baik dan sedang
3. Meningkatkan kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi baik dan sedang
4. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi untuk penanganan jalan menjadi lebih cepat dan lebih baik
5. Peningkatan kapasitas jalan secara bertahap sampai dengan tuntas
6. Peningkatan struktur terhadap jalan yang sudah habis umur rencananya
7. Pengembangan jaringan jalan provinsi
8. Pengembangan kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi

Sedangkan arah kebijakan yang diterapkan adalah :

1. Tim UPR selalu siaga di masing – masing UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan untuk perbaikan jalan setiap saat
2. Penanganan kerusakan jalan dengan pemeliharaan rutin secara cepat, akurat dan tepat
3. Penanganan dengan pemeliharaan berkala jalan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai umur rencana
4. Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan respon lebih cepat terhadap kerusakan jalan

5. Penggunaan alat pemeliharaan jalan berteknologi baru
 6. Peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi ($VCR > 1$)
 7. Peningkatan struktur jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan yang rusak berat dan umur rencana sudah habis
 8. Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatab Jawa Timur (Pansela)
 9. Pembangunan jalan menuju kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi
- b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Provinsi Jawa Timur bertugas pokok dalam urusan bidang cipta karya dan tata ruang di Provinsi Jawa Timur. Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Provinsi Jawa Timur adalah “Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptaan karya yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis”. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditunjang dengan Misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang;
2. Melaksanakan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan;

4. Melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan bangunan gedung serta pembinaan jasa.

c. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur bertugas dalam urusan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, isu – isu strategis yang dihadapi untuk periode 2019 – 2024 adalah :

1. Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk
2. Meningkatkan resapan air di hulu DAS untuk mengurangi resiko bencana dan menambah simpanan air tanah
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai
4. Mendukung Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan
5. Memantapkan ketahanan air dalam rangka mendukung sector strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka tujuan Renstra DPU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 adalah “Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor – sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat”. Guna mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang diperbaiki.

2. Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Menurunnya kejadian banjir di sungai – sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi

Adapun strategi yang ditetapkan adalah:

1. Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air
2. Peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sector
3. Penambahan kapasitas resapan di hulu Daerah Aliran Sungai
4. Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi
5. Optimalisasi kebutuhan air irigasi
6. Revitalisasi kpasitas tamping sungai dan perbaikan tanggul kritis
7. Peningkatan kualitas penanganan kejadian banjir

Sedangkan arah kebijakan yang disusun sebagai berikut :

1. Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air
2. Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air
3. Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat
4. Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi
5. Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data
6. Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air
7. Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA
8. Kaji ulang DED sungai dan irigasi
9. Penguatan koordinasi antar lembaga pengelola

10. Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3)
11. Penanaman Pohon
12. Rehabilitasi Bangunan Utama
13. Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder
14. Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi
15. Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A
16. Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten
17. Percepatan pengesahan Perda Irigasi
18. Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun
19. Perkuatan Institusi OP Irigasi
20. Penyediaan data OP yang sahih (valid) dan akurat
21. Inisiasi Modernisasi Irigasi
22. Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi
23. Penertiban sempadan
24. Sertifikasi aset
25. Pemasangan Patok Batas
26. Penentuan 30 Sungai Prioritas di WS Kewenangan Provinsi
27. Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet
28. Parapet Bio Engineering
29. Penanaman Vetiver
30. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Koordinasi antar Lembaga
31. Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir
32. Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk
33. Pembentukan Satuan Pemantau Banjir

34. Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun
35. Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir
36. Pengoperasian Ruang Kendali Sungai
37. Publikasi Data Sungai rawan banjir

Ditinjau dari Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2020 – 2024, Renstra DPU Bina Marga 2014 – 2019, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Marga 2014 – 2019 dan Renstra DPU Sumber Daya Air 2014 – 2019 terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan yang ditabulasikan dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3. 3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial				
Indikator Sasaran:				
1. Indeks Kualitas Jalan	Sasaran Strategis kedua (SS-2): Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Indiaktor SS-2 :			
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Saluran drainase jalan kurang memadai sehingga masih terdapat genangan air pada permukaan jalan yang mengakibatkan lubang pada lapisan jalan	Dilakukannya kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jembatan, rekonstruksi jalan, survey kondisi jalan/jembatan
			Banyak pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan klas jalan	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
			kurangnya kesadaran pemanfaatan dari fungsi trotoar	Sosialisasi yang berkelanjutan
2. Indeks Layanan Drainase	Sasaran Strategis pertama (SS-1): Meningkatnya			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air			
	Indiaktor SS-1 : 1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;			
	2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;	Kapasitas saluran drainase menurun	Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan karakteristik dan tata guna lahan	Melakukan normalisasi serta pengukuran kapasitas saluran secara berkala
	3. Kapasitas tampung per kapita;	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan	Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara	Dilakukannya identifikasi saluran secara berkesinambungan

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.	infrastruktur yang belum memadai)	kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal	
3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara		Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	Terbatasnya lahan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan gedung negara	Kerja tim serta koordinasi yang baik dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi penyediaan prasarana perkantoran

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran Strategis ketiga (SS-3): Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau			
	Indiaktor SS-3 : 1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;			
	2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran Strategis keempat (SS-4): Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
	Indiaktor SS-4 : 1. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;			
	2. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4. Indeks Penataan Ruang		Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Revisi RTRW Kota Pasuruan dalam proses pengesahan	Percepatan proses Revisi RTRW Kota Pasuruan
		Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi dan informasi terkait rencana tata ruang kepada masyarakat	Dilakukannya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pemanfaatan tata ruang
		Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Meningkatkan koordinasi teknis dalam rencana pembebasan lahan untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
	Indiaktor SS-5 :			
	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; 2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi			

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pembiayaan yang efisien dan efektif;			
	3. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;			
	4. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;			
	5. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;			
	6. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.			

Salah satu faktor penghambat terlaksananya indikator sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal. Faktor penghambat ini mempengaruhi tercapainya indikator indeks layanan drainase pada Renstra PD dan indikator kapasitas tampung per kapita dan volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu terdapat faktor pendukung berupa dilakukannya identifikasi saluran secara berkesinambungan yang dapat mengatasi permasalahan terkait tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)

Tabel 3. 4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial				
Indikator Sasaran:				
1. Indeks Kualitas Jalan	Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur			
	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Indiaktor 1: Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran 2: Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Saluran drainase jalan kurang memadai sehingga masih terdapat genangan air pada permukaan jalan yang mengakibatkan lubang pada lapisan jalan	Dilakukannya kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jembatan, rekonstruksi jalan, survey kondisi jalan/jembatan
	Indiaktor 2:		Banyak pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan klas jalan	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
	Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanan/ Level of Service (LoS) minimal B			
			kurangnya kesadaran pemanfaatan dari fungsi trotoar	Sosialisasi yang berkelanjutan
2. Indeks Layanan Drainase	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan			
	Indikator 1: Indeks Ketahanan Air			
	Sasaran 2:	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan	Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin	Dilakukannya identifikasi saluran secara berkesinambungan
	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran			
	Pembawa/ Pembuang yang diperbaiki	infrastruktur yang belum memadai)	meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien,	

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Indikator 2:			
	% Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik			
	Sasaran 3: Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal	
	Indikator 3:			
	% tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi			
	Sasaran 4: Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan	Kapasitas saluran drainase menurun	Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan	Melakukan normalisasi serta pengukuran kapasitas saluran secara berkala

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	setelah pembangunan parapet dan normalisasi		perubahan karakteristik dan tata guna bahan	
	Indikator 4: % Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir			
	Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
	Indikator 5: Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur			
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
	Indikator 1: Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan	Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan	- Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi - Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset	public dan akuntabilitas kinerja	tegas (punishment) bagi PNS
	Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak			
	Indikator 2: Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni			

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sasaran 3: Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan			
	Persentase penyelenggaraan penataan ruang			
		Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi dan informasi terkait rencana tata ruang kepada masyarakat	Dilakukannya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pemanfaatan tata ruang

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	Terbatasnya lahan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan gedung negara	Kerja tim serta koordinasi yang baik dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi penyediaan prasarana perkantoran
		Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Meningkatkan koordinasi teknis dalam rencana pembebasan lahan untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara

Salah satu faktor penghambat terlaksananya indikator sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Renstra Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan karakteristik dan tata guna lahan. Faktor penghambat ini mempengaruhi tercapainya indikator indeks layanan drainase pada Renstra PD dan indikator menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi pada Renstra Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat faktor pendukung berupa dilakukannya normalisasi serta pengukuran kapasitas saluran secara berkala yang dapat mengatasi permasalahan terkait Kapasitas saluran drainase menurun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan maka dapat diketahui Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang hingga arah lokasi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan yang disajikan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 5

Telaahan Tata Ruang Terkait Permasalahan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perwujudan Struktur Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Tata Ruang sebagai perencana struktur ruang Kota Pasuruan membuat kajian	Kesulitan dalam memperoleh data rencana perwujudan struktur ruang dalam bentuk peta	Kurang lengkapnya data yang dimiliki oleh PD pengampu kegiatan sesuai dengan indikasi program pembangunan RTRW	Koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak - pihak terkait
Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan					
Pusat Pelayanan Kota					
Pusat Pemerintahan skala kota	Kelurahan Kebonsari		lokasi yang diberikan kepada bidang tata ruang kurang akurat		
Pusat peribadatan skala kota	Kelurahan Kebonsari				
Subpusat Pelayanan Kota Kota Barat			Data yang tersedia kurang update		

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pusat Peribadatan	Kelurahan Karangketug	yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur	Kurangnya SDM yang ahli dalam penataan ruang		
Subpusat Pelayanan Kota Timur					
Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Blandongan				
Pusat perkantoran skala kota	Kelurahan Blandongan				
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi			Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	Saluran drainase jalan kurang memadai sehingga masih terdapat genangan air pada	Dilakukannya kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan,
Sistem Jaringan Jalan					
Jalan Umum					
	Ruas jalan Airlangga				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	ruas jalan Panglima Sudirman			permukaan jalan yang mengakibatkan lubang pada lapisan jalan serta Banyak pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan klas jalan	pemeliharaan rutin jembatan, rekonstruksi jalan, survey kondisi jalan/jembatan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
	ruas jalan KH. Wachid Hasyim Utara				
	ruas jalan KH. Wachid Hasyim Selatan				
	ruas jalan Hayam Wuruk				
	ruas jalan Diponegoro				
	ruas jalan Kartini				
	ruas jalan Gajah Mada				
	ruas jalan Hasanudin				
	ruas jalan Balaikota				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Pahlawan				
	ruas jalan Slagah				
	ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo				
	ruas jalan Kartenegara				
	ruas jalan Brawijaya				
	ruas jalan Lingkar Utara				
Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	ruas jalan Brigjend Slamet Riyadi				
	ruas jalan Raden Patah				
	ruas jalan Adi Sucipto				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan I Gusti Ngurah Rai				
	ruas jalan Jaksa Agung Suprpto				
	ruas jalan Sulawesi				
	ruas jalan Nias				
	ruas jalan Dr. Sutomo				
	ruas jalan Sultan Agung				
	ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo				
	ruas jalan Ki Hajar Dewantara				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan KH. Mansyur				
	ruas jalan Patiunus				
	ruas jalan Patimura				
	ruas jalan Letjend MT. Haryono				
	ruas jalan alun-alun				
	ruas jalan WR. Supratman				
	ruas jalan Sunan Ampel				
	ruas jalan RE. Martadinata				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Halmahera				
	ruas jalan Letjend S. Parman				
	ruas jalan Kom. Yos Sudarso				
	ruas jalan Raden Wijaya				
	ruas jalan Dharmawangsa				
	ruas jalan Antasari				
	ruas jalan Iskandar Muda				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan dr. Moestopo				
Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	ruas jalan Menara				
	ruas jalan TB Simatupang				
	ruas jalan Teuku Umar				
	ruas jalan Ade Irma Suryani Nasution				
	ruas jalan AH Nasution				
	ruas jalan Pasar Meubel Randusari				
	ruas jalan Cendana				
	ruas jalan Jati				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Ulin				
	ruas jalan Lombok				
	ruas jalan Maluku				
	ruas jalan Kumala				
	ruas jalan Kalimantan				
	ruas jalan Banda				
	ruas jalan Irian Jaya				
	ruas jalan Sisingamangaraja XII				
	ruas jalan Krapyakrejo				
	ruas jalan Jolondriyo				
	ruas jalan Jolodaran				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Purut				
	ruas jalan Margo Utomo				
	ruas jalan Mangga				
	ruas jalan R.W. Monginsidi				
	ruas jalan Tirtayasa				
	ruas jalan Simpang Airlangga				
	ruas jalan Margo Taruno				
	ruas jalan Basuki Rachmat				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Kebon Mangga				
	ruas jalan Supriadi				
	ruas jalan Sastro Surotoko				
	ruas jalan Rajawali				
	ruas jalan Kyai Syarkowi				
	ruas jalan Kyai Muso				
	ruas jalan Kyai Supik				
	ruas jalan KH. Agus Salim				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan KH. Samanhudi				
	ruas jalan Sekargadung				
	ruas jalan Sekarsono				
	ruas jalan Trunojoyo				
	ruas jalan Cakraningrat				
	ruas jalan Kepel				
	ruas jalan Terusan Kepel				
	ruas jalan Kepel Utara				
	ruas jalan Tapaan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Imam Bonjol				
	ruas jalan Cemara				
	ruas jalan HOS Cokroaminoto I				
	ruas jalan HOS Cokroaminoto II				
	ruas jalan KH. Hasyim Ashari II				
	ruas jalan Sambirejo				
	ruas jalan Kejobo Lor				
	ruas jalan Jelakrejo I				
	ruas jalan Jelakrejo II				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Bitingan				
	ruas jalan Glagah				
	ruas jalan Wiroguno				
	ruas jalan Dewi Sartika				
	ruas jalan KH. Abdul Hamid				
	ruas jalan Terusan KH. Abdul Hamid				
	ruas jalan Sumatera				
	ruas jalan Terusan Sumatera				
	ruas jalan Belitung				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Terusan Belitung				
	ruas jalan Pierre Tendean				
	ruas jalan Brigjen Katamso				
	ruas jalan Stasiun				
	ruas jalan Kolonel Sugiono				
	ruas jalan Kalianget				
	ruas jalan Hang Tuah				
	ruas jalan Sutan Syahrir				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan M. Yamin				
	ruas jalan Mojopahit I				
	ruas jalan Mojopahit II				
	ruas jalan Brantas				
	ruas jalan Musi				
	ruas jalan Mahakam				
	ruas jalan Barito				
	ruas jalan Asahan				
	ruas jalan KH. Wahab Hasbullah				
	ruas jalan Terusan Piere Tendean				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ruas jalan Simpang Teuku Umar				
	ruas jalan Simpang Ade Irma Suryani Nasution				
	ruas jalan Kyai Sepuh				
	ruas jalan Karangketug				
Pengembangan Jalan Baru	Jalan Lingkar Utara dan Jalan Karangketug		Belum terrealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Meningkatkan koordinasi teknis dalam rencana pembebasan lahan untuk mengurangi konflik di masyarakat	Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perwujudan Sistem Jaringan Energi			Kesulitan dalam memperoleh data rencana perwujudan struktur ruang dalam bentuk peta	Kurang lengkapnya data yang dimiliki oleh PD pengampu kegiatan sesuai dengan indikasi program pembangunan RTRW	Koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak - pihak terkait
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrika					
Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan sarana pendukung					
Pengembangan fiber optic dan microcell	Seluruh wilayah kota		Data yang tersedia kurang update		
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air			Kurangnya SDM yang bertugas dalam penanganan banjir		
Prasarana Sumber Daya Air					
Sistem Pengendalian Banjir					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan bangunan pengendali banjir	Kelurahan Karangketug				
	Kelurahan Blandongan				
	Kelurahan Ngemplakrejo				
	Kelurahan Panggungrejo				
Pengembangan rumah pompa	Kelurahan Ngemplakrejo				
	Kelurahan Panggungrejo				
	Kelurahan Karangketug				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penyediaan alat pengendali Rob	Kelurahan Ngemplakrejo				
	Kelurahan Panggungrejo				
	Kelurahan Karangketug				
Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori	Seluruh Kota				
Pengerukan sungai secara berkala	Seluruh Kota				
Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air (DAM Bintingan)	Kelurahan Blandongan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perwujudan Infrastruktur Perkotaan			Kurangnya tenaga ahli dalam bidang penataan ruang, data yang dibutuhkan kurang update, kesulitan dalam memperoleh data dalam bentuk peta serta data lokasi yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang sesuai	Kurang lengkapnya data yang dimiliki oleh PD pengampu kegiatan sesuai dengan indikasi program pembangunan RTRW	Koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak - pihak terkait
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)					
Pengembangan Sistem pembuangan air limbah non domestik	Kelurahan Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapaan, Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Ngemplakrejo				
Pengembangan Sistem pembuangan air limbah domestik	IPAL Purworejo, IPAL Gadingrejo, IPAL Bugul Kidul, IPAL Panggungrejo, Pengolahan Lindi di Tempat Pengolahan Akhir Blandongan, IPLT di Kelurahan Blandongan, Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Blandongan, Kelurahan Bakalan, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Trajeng, dan Kelurahan Karanganyar				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Purutrejo				
Sistem jaringan persampahan					
Pengembangan TPS3R	1. Kelurahan Karanganyar; 2. Kelurahan Bugul Lor; 3. Kelurahan Tembokrejo; 4. Kelurahan Purutrejo; 5. Kelurahan Blandongan; 6. Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Krampyangan; 7. Kelurahan Karangketug; 8. Kelurahan Sebani; 9. Kelurahan Gadingrejo; 10. Kelurahan Randusari; dan 11. Kelurahan Bukir.				
Pengembangan TPA Regional	Kota Pasuruan				
Pengembangan Bio Energy di TPA	Kelurahan Blandongan				
Sistem Drainase					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Normalisasi saluran primer	1. Sungai Gembong; 2. Sungai Petung; dan 3. Sungai Welang		Kurangnya SDM yang bertugas dalam normalisasi saluran	Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan karakteristik dan tata guna bahan	Melakukan normalisasi serta pengukuran kapasitas saluran secara berkala
Pembangunan dan normalisasi saluran sekunder	Seluruh Kecamatan kota				
Pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier	seluruh Kota Pasuruan				
Sistem Jaringan Pejalan Kaki			Belum semua jalan memiliki trotoar	kurangnya kesadaran pemanfaatan dari fungsi trotoar	Sosialisasi yang berkelanjutan
Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran	1. Jalan A. Yani; 2. Jalan Soekarno-Hatta; 3. Jalan D.I Panjaitan; 4. Jalan Letjen				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
dan zona sarana pelayanan umum	Suprpto; 5. Jalan Veteran; 6. Jalan Ir. Juanda; 7. Jalan Gatot Subroto; 8. Jalan Urip Sumoharjo; 9. Jalan Untung Suropati; 10. Jalan Dr. Setiabudi; 11. Jalan K.H. Hasyim Ashari; 12. Jalan HOS. Cokroaminoto; 13. Jalan Sulawesi; 14. Jalan KH. Wachid Hasyim; 15. Jalan Panglima Sudirman; 16. Jalan Pahlawan;				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dan 17. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo.				
Perwujudan Pola Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Tata Ruang sebagai perencana pola ruang Kota Pasuruan membuat kajian yang dijadikan	Kurangnya tenaga ahli dalam bidang penataan ruang, data yang dibutuhkan kurang update, kesulitan dalam memperoleh data dalam bentuk peta serta data lokasi yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan	Kurang lengkapnya data yang dimiliki oleh PD pengampu kegiatan sesuai dengan indikasi program pembangunan RTRW	Koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak - pihak terkait
Perwujudan Kawasan Lindung					
Pengendalian dan pemeliharaan Badan Air	seluruh kota				
Kawasan perlindungan setempat					
Pengendalian alihfungsi dengan penetapan Sempadan Sungai					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penetapan sungai bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai	Sungai Gembong, Sungai Welang dan Sungai Petung	sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur	Umum dan Penataan Ruang kurang sesuai		
Penetapan sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Sungai Gembong, Sungai Welang dan Sungai Petung				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perwujudan Kawasan Budidaya					
Pemeliharaan Badan Air	seluruh kota				
Kawasan Pertanian					
Kawasan tanaman pangan					
Mempertahankan kawasan tanaman pangan	1. Kelurahan Bakalan; 2. Kelurahan Blandongan; 3. Kelurahan Bugul Kidul; 4. Kelurahan Kepel; 5. Kelurahan Krampyangan; 6. Kelurahan Gadingrejo; 7. Kelurahan Gentong;				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	8. Kelurahan Karangketug; 9. Kelurahan Krapyakrejo; 10. Kelurahan Sebani; 11. Kelurahan Karanganyar; 12. Kelurahan Petamanan; 13. Kelurahan Kebonagung; 14. Kelurahan Pohjentrek; 15. Kelurahan Purutrejo; 16. Kelurahan Sekargadung; 17.				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kelurahan Tembokrejo; dan 18. Kelurahan Wirogunan.				
Pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Bakalan				
Kawasan Pariwisata					
Pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada	Seluruh kota				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan kawasan wisata buatan	Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan Sekargadung				
Kawasan Permukiman					
Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bangilan, Kelurahan Bugul Lor,				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kelurahan Kandang sapi, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Petamanan, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Trajeng, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purutrejo,				

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Wirogunan				
Pengembangan Kawasan Perkantoran	seluruh kelurahan				
Perwujudan Kawasan Strategis Kota					
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan wisata bahari	Kelurahan Blandongan dan Kepel				
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya					
Kompleks kawasan bekas bangunan kolonial	Pelabuhan – Jalan Balaikota – Jalan Pahlawan				
Kawasan pecinan	Kelurahan Trajeng				
Kawasan religi sekitar Masjid AlAnwar	Kelurahan Kebonsari				

Dalam menyusun rencana struktur ruang serta rencana pola ruang Kota Pasuruan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan dalam memperoleh data dalam bentuk peta, kurangnya tenaga ahli dalam bidang penataan ruang, data dari pihak – pihak terkait kurang update, dll. Hal ini menyebabkan kurang lengkapnya data yang dimiliki oleh PD pengampu kegiatan sesuai dengan indikasi program pembangunan RTRW. Namun, hal ini dapat disiasati dengan dilakukannya koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan pihak - pihak terkait.

Selain ditinjau dari Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan, perlu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dari KLHS tersebut dapat diketahui permasalahan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong sesuai tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 6

Telaah KLHS terkait Permasalahan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Konflik Tata Ruang, Penyediaan Pangan dan Air Kota Pasuruan	Membangun tangkapan air di wilayah perumahan	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Luas areal sawah/pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat dengan demikian bidang pengairan dituntut untuk memberikan pelayanan air irigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan produksi pertanian akan optimal	Dilakukannya identifikasi saluran secara berkesinambungan
	Mengefisiensikan penggunaan air untuk kebutuhan domestik irigasi lahan pertanian, dan industri			
Kualitas Permukiman, Pengendalian Banjir dan	Membangun tangkapan air di wilayah perumahan	Kapasitas saluran drainase menurun	Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan	Melakukan normalisasi serta pengukuran

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persampahan Kota Pasuruan	Pengerukan sungai		karakteristik dan tata guna lahan	kapasitas saluran secara berkala
	Penetapan tata ruang lahan sempadan sungai			
	Penentuan baku mutu kelas air sungai			
	Penentuan daya tampung beban pencemaran air sungai			
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai			
	Menata aktivitas kota dengan konsep bebas lahan terdegradasi dengan menerapkan			

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	penggunaan lahan campuran			

Salah satu permasalahan yang muncul berdasarkan telaah terhadap KLHS RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada pelayanan saluran irigasi yang kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan identifikasi saluran secara berkesinambungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ditentukan dan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga berpengaruh terhadap tercapainya sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PD Provinsi Jawa Timur yakni Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Selain itu, isu – isu strategis ini juga didasarkan pada permasalahan yang berdampak pada implementasi RTRW dan KLHS pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Dari 7 (tujuh) permasalahan yang telah disebutkan pada Bab II di atas, dapat dilakukan perumpunan permasalahan dan ditarik menjadi beberapa isu strategis seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7
Pemetaan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Masih belum optimal dan belum sesuainya antara

No	Permasalahan	Isu Strategis
2	Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
3	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi
4	Kapasitas saluran drainase menurun	
5	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	
6	Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	
7	Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Menjamin ketersediaan tanah sesuai kebutuhan Dinas PUPR untuk pembangunan sarana dan prasarana umum secara tepat waktu

Salah satu isu strategis yang diangkat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul baik pada saluran irigasi dan drainase maupun pada jalan, jembatan serta bangunan gedung. Saat ini masih banyak warga yang sering membuang sampah ke saluran yang dapat mengakibatkan saluran tidak berfungsi dengan baik. Banyak pula pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermuatan tidak sesuai dengan kelas jalan yang mengakibatkan banyak jalan bergelombang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab untuk menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	70	70	70	70	70
2	Sasaran 1: Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	77,51	78	78,3	78,6	80
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,85%	81,95%	81,9%	82,12%	82,25%
2	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	77,50 %	79,32%	81,32%	83,62%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	83,42%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	66,25%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	94,75%

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan adalah 1) Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah dengan sasaran Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima dan tujuan ke 2 (dua) yaitu meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial dengan sasaran meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Keberhasilan dari masing – masing sasaran diukur dari tercapainya target pada masing-masing indikator sasaran. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang masing-masing menggambarkan capaian kerja dari setiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan sebagai tambahan. Kesesuaian antara RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan 2021-2026 dapat dilihat dari cascading berikut ini:

Tabel 4. 2
Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran RPJMD	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata			
Tujuan PD	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan social			
Indikator Tujuan PD	Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial			
Indikator Sasaran PD	Indeks Kualitas Jalan	Indeks Layanan Drainase	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Indeks Penataan Ruang
Urusan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Adapun program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka dilaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Sebagaimana telah disebutkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu strategis yang telah ditentukan serta sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dapat dipetakan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5. 1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pasuruan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Masih belum optimal dan belum sesuainya antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Peningkatan kualitas infrastruktur kota dengan mengoptimalkan perencanaan, pembangunan serta pengendalian	1. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang
Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang				2. Sinkronisasi rencana Tata Ruang
Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi			3. Pengawasan dan pengendalian pemanfatan ruang
Kapasitas saluran drainase menurun				4. Peningkatan koordinasi lintas sektor
				1. Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan drainase
				2. Pemantauan jaringan irigasi dan drainase
				3. Pengumpulan data kondisi jaringan irigasi dan drainase

PERMASALAHAN	ISU STRATEGI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab				1. Penambahan jaringan jalan 2. Peningkatan kualitas jaringan jalan 3. Pemantauan jaringan jalan dan pengumpulan data
Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas				1. Peningkatan kualitas konstruksi bangunan gedung 2. Pemantauan dan pengumpulan data kondisi bangunan gedung 3. Peningkatan keahlian tenaga terampil konstruksi
Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Menjamin ketersediaan tanah sesuai kebutuhan Dinas PUPR untuk pembangunan sarana dan prasarana umum secara tepat waktu			1. Meningkatkan penatagunaan tanah

Strategi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Peningkatan kualitas infrastruktur kota dengan mengoptimalkan perencanaan, pembangunan serta pengendalian. Hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 4 (empat) bidang yang masing – masing membidangi jalan dan jembatan, sumber daya air dan drainase, bangunan gedung dan pembinaan konstruksi serta penataan ruang. Oleh sebab itu, kebijakan – kebijakan yang diambil dibagi sesuai dengan – bidang yang membidangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 5. 2

Time Horizon Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat	Penambahan jaringan jalan		√				
		Peningkatan kualitas jaringan jalan	√	√	√	√	√	√
		Pemantauan jaringan jalan dan pengumpulan data	√	√	√	√	√	√
2	Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang bersih ke masyarakat	Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan drainase	√	√	√	√	√	√
		Pemantauan jaringan	√	√	√	√	√	√
3								

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan drainase berfungsi dengan baik	irigasi dan drainase						
		Pengumpulan data kondisi jaringan irigasi dan drainase	√	√	√	√	√	√
4	penataan ruang yang bersih dan hijau	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
		Sinkronisasi rencana Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
		Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan koordinasi lintas sektor	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas konstruksi bangunan gedung	√	√	√	√	√	√
		Pemantauan dan	√	√	√	√	√	√

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pengumpulan data kondisi bangunan gedung						
		Peningkatan keahlian tenaga terampil konstruksi	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan penatagunaan tanah	√	√	√	√	√	√

Adapun program sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan beberapa unit kerja Perangkat Daerah lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, 11 (sebelas) program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penataan Bangunan Gedung
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
10. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
11. Program Penatagunaan Tanah

Tabel 5. 3

Keterkaitan Agenda Prioritas Kepala Daerah dengan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Agenda Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
Arek Enom Motif Yuk	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Penataan bangunan dan lingkungan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Penataan bangunan dan lingkungan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
Tutur Ramah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pemeliharaan rutin jalan	Bidang Bina Marga
			Pemeliharaan rutin jembatan	Bidang Bina Marga
			Survei kondisi jalan/jembatan	Bidang Bina Marga
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pembangunan jalan	Bidang Bina Marga
			Rekonstruksi jalan	Bidang Bina Marga

Agenda Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
Kembang Giri	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pembangunan jalan	Bidang Bina Marga
			Rekonstruksi jalan	Bidang Bina Marga
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Bidang Tata Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Penataan bangunan dan lingkungan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

Agenda Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pembangunan jalan	Bidang Bina Marga
			Rekonstruksi jalan	Bidang Bina Marga
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupetan/Kota	Bidang Tata Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupetan/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pembangunan jalan	Bidang Bina Marga
			Rekonstruksi jalan	Bidang Bina Marga

Agenda Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupetan/Kota	Bidang Tata Ruang

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung 3 (tiga) agenda politis Kepada Daerah yaitu Arek Enom Motif Yuk, Tutar Ramah dan Kembang Giri melalui program, kegiatan serta sub kegiatan pada Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi, Bidang Bina Marga serta Bidang Tata Ruang. Sehingga Janji politis Kepala Daerah dapat diimplementasikan dan terealisasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	8.607.202.911	100	10.096.912.594	100	8.393.171.805	100	8.466.025.334	100	9.249.345.840	100	9.582.232.757	100	45.787.688.330	DPUPR	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	100	38.723.172	100	44.541.120	100	37.025.305	100	37.346.689	100	40.802.198	100	42.270.682	100	201.985.993	DPUPR	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	-	9 dokumen	38.723.172	9 dokumen	44.541.120	-	-	-	-	-	-	-	-	9 dokumen	44.541.120	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	9 dokumen	-	9 Laporan	37.025.305	9 Laporan	37.346.689	9 Laporan	40.802.198	9 Laporan	42.270.682	45 Dokumen	157.444.873	DPUPR	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	100	6.242.322.356	100	7.407.977.700	100	6.157.964.525	100	6.211.416.242	100	6.786.128.639	100	7.030.363.581	100	33.593.850.687	DPUPR	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan nya	-	14 Bulan	6.129.721.550	14 Bulan	7.278.537.700	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Bulan	7.278.537.700	DPUPR	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-		52 orang/bulan		50 Orang / bulan	6.050.366.073	55 Orang/bulan	6.102.883.826	55 Orang / bulan	6.667.554.242	55 Orang / bulan	6.907.521.653	55 Orang/bulan	25.728.325.794	DPUPR	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	-	14 Dok	112.600.806	14 Dok	129.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Dok	129.440.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	yang tersusun																	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-		14 laporan		14 Laporan	107.598.451	14 Laporan	108.532.416	14 Laporan	118.574.397	14 Laporan	122.841.928	70 Laporan	457.547.193	DPUPR	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100	80	33.707.858	100	38.760.000	100	32.219.685	100	32.499.355	100	35.506.363	100	36.784.248	100	175.769.651	DPUPR	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD yang tersusun	-	8 dokumen	33.707.858	8 dokumen	38.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 dokumen	38.760.000	DPUPR	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			8 laporan		8 Laporan	32.219.685	8 Laporan	32.499.355	8 Laporan	35.506.363	8 Laporan	36.784.248	40 Laporan	137.009.651	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	80	125.260.700	100	140.089.550	100	64.025.069	100	64.580.812	100	70.556.163	100	73.095.502	100	412.347.097	DPUPR	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	207 Buah	54.921.240	207 Buah	63.067.950	-	-	-	-	-	-	-	-	207 Buah	63.067.950	DPUPR	
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersusun	-	6 Dok	8.539.880	6 Dok	9.821.600	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Dok	9.821.600	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-			6 dokumen		6 Dokumen	8.164.315	6 Dokumen	8.235.182	6 Dokumen	8.997.144	6 Dokumen	9.320.954	30 Dokumen	34.717.595		
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengajian Rutin	-	12 Kali	61.799.580	12 Kali	67.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Kali	67.200.000	DPUPR	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-			80 orang		80 Orang	55.860.753	40 orang	56.345.630	40 orang	61.559.020	40 orang	63.774.548	40 orang	237.539.952		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	100	1.065.321.763	100	857.641.680	100	638.546.199	100	644.088.841	100	703.683.276	100	729.009.062	100	3.572.969.058	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	41 Unit	636.230.960	3 Unit	456.348.380	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	456.348.380	DPUPR	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			3 paket		7 Paket	379.344.708	5 Paket	382.637.456	6 paket	418.041.055	6 paket	433.086.486	27 Paket	1.613.109.704	DPUPR	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	-	11 Jenis	34.433.883	11 Jenis	49.941.300	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Jenis	49.941.300	DPUPR	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			11 paket		3 Paket	41.514.266	7 Paket	41.874.613	7 Paket	45.749.069	8 Paket	47.395.593	36 Paket	176.533.541	DPUPR	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	-	3600 Exemplar	15.886.800	3600 Exemplar	18.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3600 Exemplar	18.270.000	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			6 dokumen		96 Dokumen	15.187.142	84 dok	15.318.968	84 dok	16.736.358	84 dok	17.338.705	354 Dokumen	64.581.174	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	-	1116 Kotak	28.767.120	144 Kaleng	33.082.000	-	-	-	-	-	-	-	-	144 Kaleng	33.082.000	DPUPR	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			12 laporan		12 Laporan	27.499.783	12 Laporan	27.738.484	12 Laporan	30.304.992	12 Laporan	31.395.679	60 Laporan	116.938.939	DPUPR	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke luar kota	-	92 Kali	350.003.000	92 Kali	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	92 Kali	300.000.000	DPUPR	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			92 laporan		95 Laporan	175.000.300	95 Laporan	176.519.319	95 Laporan	192.851.801	95 Laporan	199.792.599	472 Laporan	744.164.019	DPUPR	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100	0	-	100	453.425.680	100	399.361.305	100	402.827.799	100	186.043.587	100	192.739.355	100	1.634.397.725	DPUPR	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	2 Unit	250.333.930	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	250.333.930	DPUPR	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	-			2 Unit		2 Unit	230.539.010	1 Unit	232.540.111	-	-	-	-	5 Unit	463.079.122	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Lapangan yang Disediakan																	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	-	-	5 Unit	35.651.070	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	35.651.070	DPUPR	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			5 Unit		14 Unit	29.635.352	6 Unit	29.892.589	8 Unit	32.658.407	8 Unit	33.833.793	43 Unit	126.020.141	DPUPR	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	8 Unit	167.440.680	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	167.440.680	DPUPR	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			8 Unit		11 Unit	139.186.943	4 Unit	140.395.099	5 Unit	153.385.180	6 Unit	158.905.562	34 Unit	591.872.783	DPUPR	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	80	459.740.190	100	468.868.500	100	494.110.078	100	498.399.000	100	544.513.457	100	564.110.670	100	2.570.001.705	DPUPR	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	-	2 Jenis	17.216.640	2 Jenis	19.763.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	19.763.500	DPUPR	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			100 Laporan		100 Laporan	16.428.631	12 Laporan	16.571.233	12 Laporan	18.104.489	12 Laporan	18.756.076	248 Laporan	69.860.429	DPUPR	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	-					12 Laporan	104.357.880	12 Laporan	105.263.716	12 Laporan	115.003.260	12 Laporan	119.142.265	48 Laporan	443.767.121	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	18 Orang	442.523.550	15 Orang	449.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Orang	449.105.000	DPUPR	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan		12 Laporan	373.323.567	12 Laporan	376.564.051	12 Laporan	411.405.707	12 Laporan	426.212.330	48 Laporan	1.587.505.655	DPUPR	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		80	642.126.872	100	685.608.364	100	569.919.640	100	574.866.597	100	882.112.157	100	913.859.656	100	3.626.366.414	DPUPR	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara rutin	-	19 Unit	184.792.141	36 Unit	229.789.983	-	-	-	-	-	-	-	-	36 Unit	229.789.983	DPUPR	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-			36 Unit		32 Unit	191.015.500	33 Unit	192.673.533	22 Unit	330.742.873	22 Unit	364.561.802	22 Unit	1.078.993.708	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		dibayarkan Pajaknya																	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan UPT Uji Mutu yang terpelihara	-	4 Unit	98.198.643	4 Unit	62.848.396	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	62.848.396	DPUPR	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			4 unit		11 Unit	52.243.434	25 Unit	52.696.912	36 Unit	191.386.442	36 Unit	176.359.114	36 Unit	472.685.901	DPUPR	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin	-	28 Unit	23.799.980	92 Unit	27.339.985	-	-	-	-	-	-	-	-	92 Unit	27.339.985	DPUPR	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 Unit		61 Unit	22.726.669	81 unit	22.923.939	81 unit	25.044.980	81 unit	25.946.357	81 Unit	96.641.945	DPUPR	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara secara rutin	-	1 Gedung kantor	335.336.108	1 Gedung kantor	365.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung kantor	365.630.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	-					1 Unit	303.934.037	4 Unit	306.572.213	4 Unit	334.937.862	4 Unit	346.992.383	4 Unit	1.292.436.496	DPUPR	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	76,84	84,14	4.941.700.861	84,89	10.954.801.000	87,64	4.424.816.823	90,38	5.104.595.444	93,13	5.241.523.770	93,13	5.569.954.300	93,13	31.295.691.337	DPUPR	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	76,84	84,14	328.293.129	84,89	183.500.000	87,64	315.088.400	89,63	455.088.400	91,64	455.088.400	92,63	455.088.400	93,13	1.863.853.600	DPUPR	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas pintu air yang dibangun	-	30 m2	201.235.914	19 m2	119.018.740	-	-	-	-	-	-	-	-	19 m2	119.018.740	DPUPR	
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	-	-	12 Unit	-	8 unit	130.967.200	13 unit	270.967.200	13 unit	270.967.200	13 unit	270.967.200	59 unit	943.868.800	DPUPR	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan	Jumlah petani pemakai air yang dibina	-	92 petani	52.662.390	100 orang	21.340.760	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	21.340.760	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		100 orang		120 orang	99.123.100	120 orang	99.123.100	120 orang	99.123.100	120 orang	99.123.100	480 orang	396.492.400	DPUPR	
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi dan rekomendasi teknis saluran irigasi dan drainase	-	2 dokumen	74.394.825	2 dokumen	43.140.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	43.140.500	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-		2 dokumen		2 Dokumen	84.998.100	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	84.998.100	DPUPR	
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan	-	-	-	-	-	-	-	1 lembaga	99.123.100	1 lembaga	99.123.100	1 lembaga	99.123.100	3 Lembaga	297.369.300	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kabupaten/Kota	Diberdayakan																	
1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	84.998.100	2 Dokumen	84.998.100	2 Dokumen	84.998.100	6 Dokumen	254.994.300	DPUPR	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	76,84	84,14	4.613.407.732	84,89	10.771.301.000	87,64	4.109.728.423	90,38	4.649.507.044	93,13	4.786.435.370	93,13	5.114.865.900	93,13	29.431.837.737	DPUPR	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	-	1558 meter	1.405.277.262	438 meter	4.382.681.679	-	-	-	-	-	-	-	-	438 m	4.382.681.679	DPUPR	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	-	-	0,438 km		0,988 km	900.855.600	0,988 km	900.855.600	1,28 km	1.037.783.926	1,28 km	1.037.783.926	4,974 km	3.877.279.052	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	1627 meter	1.502.800.960	1377 Meter	4.461.171.318	2,273 km	1.173.696.023	2,52 km	1.713.474.644	2,52 km	1.713.474.644	2,52 km	2.041.905.174	11,21km	11.103.721.803	DPUPR	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi yang dipelihara secara rutin	-	20 lokasi	1.705.329.510	20 Lokasi	1.927.448.003	-	-	-	-	-	-			20 lokasi	1.927.448.003	DPUPR	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-		53,9 km		53,9 km	2.035.176.800	53,9 km	2.035.176.800	53,9 km	2.035.176.800	53,9 km	2.035.176.800	53,9 km	8.140.707.200	DPUPR	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	98,86	99,14	3.956.593.331	99,29	8.488.922.000	99,43	4.302.736.985	99,57	4.437.242.914	99,72	4.722.685.340	99,72	4.814.776.920	99,72	26.766.364.159	DPUPR	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	98,86	99,14	3.956.593.331	99,29	8.488.922.000	99,43	4.302.736.985	99,5	4.437.242.914	99,57	4.722.685.340	99,57	4.814.776.920	99,72	26.766.364.159	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang terhubung langsung dengan sungai yang ditingkatkan																	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	1 Dokumen	94.685.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	94.685.400	DPUPR	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	-	2331 meter	2.151.632.708	2660 m	6.440.065.835	807 m	1.805.187.285	-	-	-	-	-	-	6817 m	1.805.187.285	DPUPR	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia	-	1 dokumen	153.059.815	1 Dokumen	192.537.000	-								1 Dokumen	192.537.000	DPUPR	
		Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	-	-		104 unit	-	10 unit	400.819.400	-	-	-	-	-	-	144 Unit	400.819.400	DPUPR	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	-	6 lokasi	1.651.900.808	11 Lokasi	1.761.633.765	-								11 lokasi	1.761.633.765	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-		-	-	18191 m	2.096.730.300	-	-	-	-	-	-	18191 m	2.096.730.300	DPUPR	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	2 sistem drainase	1.939.693.214	1 sistem drainase	2.100.000.000	1 sistem drainase	2.192.091.580	4 sistem drainase	6.231.784.794	DPUPR	
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	400.819.400	10 unit	400.819.400	10 unit	400.819.400	30 Unit	1.202.458.200	DPUPR	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	5 sistem	2.096.730.300	5 sistem	2.221.865.940	5 sistem	2.221.865.940	15 sistem drainase	6.540.462.180	DPUPR	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	82,28	83,51	25.895.857.651	84,86	5.642.818.000	86,22	6.168.486.334	87,57	6.970.766.525	88,92	7.788.600.000	88,92	8.088.600.000	88,92	34.659.270.859	DPUPR	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Ko	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	82,28	83,51	25.895.857.651	84,86	5.642.818.000	86,22	6.168.486.334	87,57	6.970.766.525	88,92	7.788.600.000	88,92	8.088.600.000	88,92	34.659.270.859	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	pendukungnya yang terbangun																	
		Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun dan diserahkan kepada pihak ketiga	-	5 Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Jumlah gedung sarana pendidikan dan prasarana pendukungnya yang terbangun	-	6 Sekolah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Jumlah gedung Sarana Perdagangan dan prasarana pendukungnya yang terbangun	-	2 Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun	-	-		1 BGN	1.177.670.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 BGN	1.177.670.100	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Dokumen Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	-			3 dokumen	-	3 Dokumen	2.517.931.300	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	2.517.931.300	DPUPR	
1.03.09.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	-	0	-	0		-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	3 dokumen	170.000.000		
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan	-	11 kali	40.999.823	14 Kali	45.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kali	45.100.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	-			14 dokumen	-	4 Dokumen	51.062.000	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	51.062.000	DPUPR	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kota yang direhabilitasi, direnovasi dan diubahsui	-	-	-	9 BGN	4.344.047.900	-	-	-	-	-	-	-	-	9 BGN	4.344.047.900	DPUPR	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	-			9 unit	-	4 Unit	8.525.400.800	-	-	-	-	-	-	4 unit	8.525.400.800	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	36 dokumen	315.000.000	DPUPR	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	1.850.000.000	1 dokumen	1.950.000.000	3 dokumen	5.300.000.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	12 bantuan teknis	55.000.000	12 bantuan teknis	60.000.000	12 bantuan teknis	75.000.000	36 bantuan teknis	190.000.000	DPUPR	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	5.265.766.525	3 unit	5.718.600.000	3 unit	5.888.600.000	9 unit	16.872.966.525	DPUPR	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	0		0		1 dokumen	50.000.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	57,78	57,78	-	60,56	6.352.666.600	63,33	3.487.962.135	66,11	3.685.094.920	68,89	4.099.802.857	68,89	4.409.937.143	68,89	22.035.463.655	DPUPR	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	57,78	57,78	-	60,56	6.352.666.600	63,33	3.487.962.135	59,00	3.685.094.920	60,15	4.099.802.857	61,25	4.409.937.143	61,25	22.035.463.655	DPUPR	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakannya	-	0	-	6 Kali	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Kali	100.000.000	DPUPR	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah bangunan dan lingkungan bangunan yang tertata	-	0	-	2 BGN	6.202.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	2 BGN	6.202.666.600	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-			-	-	3 Kawasan	8.479.589.540	-	-	-	-	-	-	3 kawasan	8.479.589.540	DPUPR	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	-	-	-	-	-	-	-	1 kawasan	3.685.094.920	1 kawasan	4.099.802.857	1 kawasan	4.409.937.143	3 kawasan	12.194.834.920		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapny	69,66	72	72.176.533.951	74,36	78.483.795.804	76,58	72.002.926.574	78,8	30.058.927.358	80,8	30.751.291.737	82,8	30.745.351.060	82,8	242.042.292.533	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		a dalam Kondisi Baik dan Sedang																	
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	76,60	77,2		78,87		79,64		80,53		82,53		84,53		84,53		DPUPR	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	69,66	72	72.176.533.951	74,36	78.483.795.804	76,58	72.002.926.574	78,8	30.058.927.358	80,8	30.751.291.737	82,8	30.745.351.060	82,8	242.042.292.533	DPUPR	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan teknis yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	784.927.421	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	784.927.421	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	-			1 Dokumen		5 Dokumen	544.038.600	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	544.038.600	DPUPR	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan untuk Jalan Lingkar Utara	-	8 Kelurahan	52.359.628.441	2 Kelurahan	32.066.029.958	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelurahan	32.066.029.958	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah tanah yang dibebaskan untuk Kepentingan Umum	-	1 Kelurahan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	-			1M2		278491 M²	27.826.187.640	-	-	-	-	-	-	278492 m2	27.826.187.640	DPUPR	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah ruas leger jalan yang terdata	-	11 ruas	94.798.440	10 Ruas	105.724.843									10 Ruas	105.724.843	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	-			1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	DPUPR	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen DED yang direncanakan	-	2 Dokumen	770.836.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Jumlah jembatan yang terdata	-	27 Buah		27 Buah	209.371.512	-	-	-	-	-	-	-	-	27 Buah	209.371.512	DPUPR	
		Jumlah ruas jalan yang terdata	-	97 Ruas		97 Ruas		-	-	-	-	-	-	-	-	97 Ruas	-	DPUPR	
		Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	-			2 Dokumen		2 Dokumen	188.694.640	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	188.694.640	DPUPR	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	-					-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkapny a yang direkonstruk si/ditingkatk an	-	5 Ruas	12.734.677.988	2 Ruas	26.678.443.585	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Ruas	26.678.443.585	DPUPR	
		Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kondisinya (DAK)	-	3 Ruas		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	-			5.53 KM		4.74 KM	15.690.726.955	-	-	-	-	-	-	10 KM	15.690.726.955	DPUPR	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	-	1 Ruas	4.346.962.860	6 Ruas	13.371.496.773	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Ruas	13.371.496.773	DPUPR	
		Jumlah jalan yang dipelihara (DAK)	-	3 Ruas		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Jumlah luas jalan yang dipelihara	-	1340 m2		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaaan Secara Berkala	-			1.56 KM		7,25 KM	22.572.482.439	-	-	-	-	-	-	8,81 KM	22.572.482.439	DPUPR	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipertahanka n kondisinya	-	40 Ruas	1.167.241.644	40 Ruas	2.228.396.289	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Ruas	2.228.396.289	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	-			78.933 KM		78.933 KM	2.458.307.320	-	-	-	-	-	-	78,933 KM	2.458.307.320	DPUPR	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya	-	27 Jembatan	702.387.670	27 Jembatan	826.606.490	-	-	-	-	-	-	-	-	27 Jembatan	826.606.490	DPUPR	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	-			355.5 m		355.5 M	896.051.640	-	-	-	-	-	-	355,5 M	896.051.640	DPUPR	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	-	-	-	1 Dokumen	88.017.950	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	88.017.950	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-			1 Dokumen		2 Dokumen	57.631.540	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	57.631.540	DPUPR	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan	Dokumen pengawasan teknis yang disusun	-	-	-	2 dokumen	2.124.780.983	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	2.124.780.983	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-			2 dokumen		11 Dokumen	913.805.800	-	-	-	-	-	-	13 Dokumen	913.805.800	DPUPR	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	108.000.000	1 Dokumen	105.724.860	1 Dokumen	105.724.860	4 Dokumen	319.449.720	DPUPR	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	424.600.000	7 dokumen	530.060.000	5 dokumen	385.000.000	24 Dokumen	1.883.698.600	DPUPR	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	-	-	-	-	-	-	-	6,45 KM	787.500.000	6,25 KM	638.760.000	7,75 KM	678.740.000	37 Dokumen	3.018.805.800	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	9,463 KM	24.241.847.700	9,613 KM	26.139.047.700	10,913 KM	28.036.247.700	1,6 KM	3.794.400.000	DPUPR	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	-	-	-	-	-	-	2,15 KM	8.865.817.758	3,75 KM	19.676.667.528	4,95 KM	17.284.117.122	21.12 KM	61.517.329.363	DPUPR	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	-	-	-	-	-	-	4,3 KM	16.055.212.500	2,5 KM	4.589.235.000	2,8 KM	5.829.250.000	18,41 KM	49.046.179.939	DPUPR	
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	-	-	-	-	-	-	10,506 KM	97.966.980	9,632 KM	87.966.980	8,599 KM	87.966.980	78,933 KM	331.532.480	DPUPR	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	-	-	-	-	-	63 Jembatan	1.358.061.220	63 Jembatan	1.226.619.344	63 Jembatan	1.517.819.073	355,5 M	4.998.551.277	DPUPR	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-	-	-	-	-	-	-	84,3365 KM	170.500.000	84,3365 KM	168.264.070	84,3365 KM	168.264.070	10 dokumen	695.722.780	DPUPR	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-	-	-	-	-	-	10,506 KM	2.191.268.900	9,632 KM	1.830.793.955	8,599 KM	2.791.268.955	78,933 KM	9.271.639.130	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	70,00	80,00	571.498.302	82	596.916.768	85	252.903.548	90	267.635.415	93	277.577.219	93	287.099.883	93	1.682.132.833	DPUPR	
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	78,00	80,00	342.197.798	81	248.982.698	82	210.601.525	84	236.095.776	85	265.738.778	85	270.738.778	85	1.232.157.555	DPUPR	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	70,00	80,00	342.197.798	81	248.982.698	82	210.601.525	84	236.095.776	85	265.738.778	85	270.738.778	85	1.232.157.555	DPUPR	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kontruksi yang dibina	-	120 pekerja konstruksi	297.256.344	120 pekerja konstruksi	197.300.086	-		-		-		-		120 pekerja konstruksi	197.300.086	DPUPR	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	-			120 orang	-	50 Orang	155.511.925	-	-	-	-	-	-	50 orang	155.511.925	DPUPR	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyedia badan usaha jasa konstruksi yang dibina	-	67 badan usaha	44.941.454	80 badan usaha	51.682.612	-	-	-	-	-	-	-	-	80 badan usaha	51.682.612	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	-			80 orang	-	80 Orang	55.089.600	-		-	-	-	-	80 orang	55.089.600	DPUPR	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	181.006.176	50 Orang	210.649.178	50 Orang	215.649.178	300 orang	607.304.532		
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	80 Lembaga	55.089.600	80 Lembaga	55.089.600	80 Lembaga	55.089.600	80 Lembaga	165.268.800		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	78,00	80,00	571.498.302	82	596.916.768	85	252.903.548	90	267.635.415	93	277.577.219	93	287.099.883	93	1.682.132.833	DPUPR	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terupdatenya data pada aplikasi SIPJAKI secara berkala	-	140 IUJK	25.999.992	4 Kali	28.599.523	-		-		-		-		4 Kali	28.599.523	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-			4 laporan	-	4 Laporan	29.327.360	-	-	-	-	-	-	4 laporan	29.327.360	DPUPR	
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen standar harga, upah, bahan dan HSBGN	-	16 dokum en	25.999.992	16 dokum en	28.599.270	-	-	-	-	-	-	-	-	16 dokume n	28.599.270	DPUPR	
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-			16 dokum en	-	16 Doku men	41.047.700	-	-	-	-	-	-	32 dokume n	41.047.700	DPUPR	
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Ketersediaan /Penggunaa n Material dan Peralatan di Kota Pasuruan	-	110 kegiata n	519.498.318	4 Kali	539.717.975	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kali	539.717.975	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggun-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan /Penggunaa n Material dan Peralatan	-			4 dokum en	-	4 Doku men	182.528.488	-	-	-	-	-	-	8 dokume n	182.528.488	DPUPR	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	12 Perangkat at Penduk ung	29.327.360	12 Perang kat Pendu kung	29.327.360	12 Perang kat Pendu kung	29.327.360	36 perangk at penduku ng	87.982.080		
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	16 Dokume n	41.047.700	16 Doku men	41.047.700	16 Doku men	41.047.700	48 Dokume n	123.143.100		
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-	-	-	-	-	-	-	1 Layanan Informa si	197.260.355	1 Layan an Inform asi	207.202.159	1 Layan an Inform asi	216.724.823	1 Layanan Informas i	621.187.337		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	0,00	0,00	-	16,67	90.000.000	33,34	100.000.000	66,68	200.000.000	83,35	200.000.000	100	200.000.000	100	790.000.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	-					-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000		
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	-					1 Dokumen	50.000.000							1 Dokumen	50.000.000	DPUPR	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	90 Persen	155.482.532	38 Kali	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 Kali	90.000.000	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	-					2 Dokumen	50.000.000	-	-					2 Dokumen	50.000.000	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota						-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	150.000.000		
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Presentase Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		100 Persen	41.720.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat						-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang			257.929.415	92	601.369.400	-	-	100	280.000.000	100	213.019.409	100	213.019.409	100	1.307.408.218	DPUPR	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kota Pusaka		100 Orang	132.009.790	-	-										-	DPUPR	
		Jumlah dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan		-		1 Dokumen	601.369.400									1 Dokumen	601.369.400	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Loka si
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		pembanguna n daerah yang disusun																	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Presentase Sistem Informasi Penataan Ruang		100 Persen	125.919.625	-	-	-	-	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	213.019.409	1 Dokumen	213.019.409	3 Dokumen	706.038.818	DPUPR	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang			198.518.656	92	389.595.025	100	1.014.378.137	100	835.815.951	100	1.014.378.137	100	1.014.378.137	100	4.268.545.387	DPUPR	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	-	80 Persen	12.625.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	-	70 Persen	105.809.875	12 Kali	389.595.025									12 Kali	389.595.025	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	N/A	-	-	28	1.125.000.000	33	526.721.976	38	552.164.570	43	720.704.000	50	1.120.047.200	50	4.044.637.746	DPUPR	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	N/A	-	-	28	1.125.000.000	33	526.721.976	38	552.164.570	43	720.704.000	50	1.120.047.200	50	4.044.637.746	DPUPR	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang disusun	-	-	-	5 Dokumen	1.125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	1.125.000.000	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	-		-	-	-	2 Dokumen	526.721.976	2 Dokumen	138.041.143	2 Dokumen	180.176.000	2 Dokumen	280.011.800	8 dokumen	1.124.950.919	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																	
2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	414.123.428	1 Laporan	540.528.000	1 Laporan	840.035.400	3 Laporan	1.794.686.828		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	30,00		216.508.496	36,67	274.356.497	43,33	272.278.659	50	275.216.457	56,67	285.026.021	63,33	290.370.018	63,33	1.397.247.652	DPUPR	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu)	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	30,00		216.508.496	36,67	274.356.497	100,00	272.278.659	100	275.216.457	100,00	285.026.021	100,00	290.370.018	63,33	1.397.247.652	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Daerah Kabupaten/Kota																		
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah petak tanah yang bersertifikat		2 Kelurahan	216.508.496	2 Kelurahan	274.356.497	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelurahan	274.356.497	DPUPR	
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah			-	-	500 Dokumen	272.278.659	500 Dokumen	275.216.457	500 Dokumen	285.026.021	500 Dokumen	290.370.018	2000 Dokumen	1.122.891.155	DPUPR		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAHAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	N/A	-	-	20	780.905.162	2	285.172.983	2	295.444.245	2	308.795.585	2	309.828.863	2	1.980.146.838	DPUPR	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	N/A	-	-	20	780.905.162	50	285.172.983	50	295.444.245	50	308.795.585	50	309.828.863	50	1.980.146.838	DPUPR	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan		-	-	8 kali	780.905.162	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	780.905.162	DPUPR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kabupaten/Kota	konsolidasi tanah																	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	1 Dokumen	285.172.983	1 Dokumen	295.444.245	1 Dokumen	308.795.585	1 Dokumen	309.828.863	4 Dokumen	1.980.146.838	DPUPR		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan pertamanya serta menjalankan urusan pertanahan sebagai tambahan. Untuk menjalankan urusan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Drainase dan Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi serta Bidang Tata Ruang.

Pada periode renstra 2021-2026, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang menjalankan 11 (sebelas) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penataan Bangunan Gedung
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
10. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
11. Program Penatagunaan Tanah

Sebagai tolak ukur keberhasilan program-program tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan indikator kinerja beserta target yang ingin dicapai yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	76,84	84,14	84,89	87,64	90,38	93,13	93,13	93,13
3	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	98,86	99,14	99,29	99,43	99,57	99,72	99,72	99,72
4	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	82,28	83,51	84,86	86,22	87,57	88,92	88,92	88,92

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	57,78	57,78	60,56	63,33	66,11	68,89	68,89	68,89
6	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang	69,66	72,00	74,36	76,58	78,80	80,80	82,80	82,80
7	Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	76.60	77,20	78,87	79,64	80,53	82,53	84,53	84,53
8	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	70	80	82	85	90	93	93	93
9	Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	78	80	81	82	84	85	85	85
10	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	0,00	0,00	16,67	33,34	66,68	83,35	100	100

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	98,65	91,91	92	92,1	92,22	92,35	92,5	92,5
12	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	N/A	N/A	28	33	38	43	50	50
13	Persentase petak tanah yang bersertifikat	30	-	36,67	43,33	50	56,67	63,33	63,33
14	Persentase tanah yang dikonsolidasi	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2

BAB VIII

PENUTUP

Renstra sebagai alat untuk pengendalian pencapaian dan perencanaan tujuan organisasi maka dapat dijelaskan hirarki pelaksanaan perencanaan program kegiatan begitu strategis dan harus mengacu pada Renstra PD. Dan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan sedang menjabarkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) 2021 – 2026 sebagai acuan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Ada beberapa program yang menjadi tumpuan keberhasilan pencapaian tujuan yang dituangkan dalam Renstra yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penataan Bangunan Gedung
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
10. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
11. Program Penatagunaan Tanah

Diharapkan dengan program tersebut, akan secara konsisten dan terarah pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya Renstra yang sudah tersusun akan ditindaklanjuti dengan Penetapan Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan akan menjadi panduan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan program kegiatan selama satu tahun yang berisi program kegiatan, sasaran dan kebijakan serta target yang akan dicapai.

Akhirnya, Dengan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, diharapkan benar – benar menjadi acuan

penyusunan perencanaan secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Pasuruan, karena pencapaian hasil seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung perencanaan strategis yang dibuat selanjutnya dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungwaban pada publik.